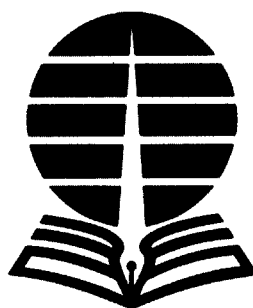


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PENATAAN KOTA
TERHADAP RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA BAUBAU**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Publik
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

LM. RAHIMIN B

NIM: 014639888

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**

ABSTRAK**Implikasi Kebijakan Penataan Kota Terhadap
Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau****L.M. Rahimin.B****Universitas Terbuka****lmrahiminbuton@ymail.com****Kata Kunci : Penataan Kota dan Pedagang Kaki Lima**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana penataan ruang Kota BauBau terhadap Pedagang Kaki Lima (2) bagaimana Pedagang Kaki Lima di relokasi. Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Sampel penelitian ini adalah sejumlah informan tertentu yang dapat memberikan keterangan sampai pada penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumen. Teknik sampling adalah purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penataan Pedagang Kaki Lima sebagai Bagian dari Visi Misi Walikota BauBau, (2) relokasi para Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan pendekatan komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur birokrasi yang handal, (3) Relokasi Pedagang Kaki Lima membuat kota terlihat rapih dan tertib dan bagi para pedagang, sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan.

ABSTRACT

**The City Management Implication Policy for The
Street Vendors Relocation At BauBau City**

L.M. Rahimin.B

Universitas Terbuka

lmrahiminbuton@ymail.com

Keywords: The City Menagement and The Street Vendors

The objectives of this research are to investigate: (1) how the public space administration in the area of BauBau city is in accordance with its allotment (the urban space administration plan); (2) how the relocation of the street vendors . This research used the descriptive qualitative method with a case study. The samples of this research were a number of determinate informants who were able to give information that was needed for the conclusion drawing and were taken by using the purposive sampling technique. The data of this research were gathered through in-depth interview, direct observation, and documents. The data were then analyzed by using the interactive analysis technique. Based on the analysis of the research, conclusions are drawn: (1) the organizing of the street vendors are the part of the Purpose (visi dan misi) of the BauBau City Government; (2) the relocation of the street vendors used the Communication, resources, disposition, dan Birocration Structure; (3) the relocation of the street vendors can being the BauBau City goodlooking and condusive and for the Street Vendors can being to up the transaction.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

P E R N Y A T A A N

**TAPM yang berjudul Implikasi Kebijakan Penataan Kota Terhadap Relokasi
Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah
saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.**

Jakarta, 2011

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEHBANGON BANGSA
TGL. 20



ADF45AA F928058202

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

Yang Menyatakan,

L.M. RAHIMIN.B

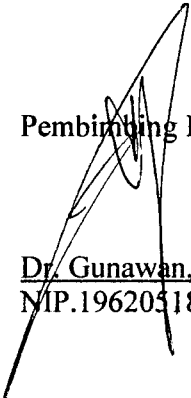
NIM. 014639888

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

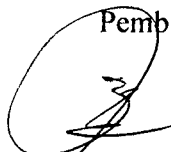
JUDUL TAPM : Implikasi Kebijakan Penataan Kota Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau.
 NAMA : L.M.RAHIMIN.B
 NIM : 014639888
 PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik

Menyetujui :

Pembimbing I,


Dr. Gunawan, M.Si
 NIP.19620518199003 1 018

Pembimbing II,


Prof. Buyung Sari, SE, MS, Ph.D
 NIP.19611231 198803 1 018

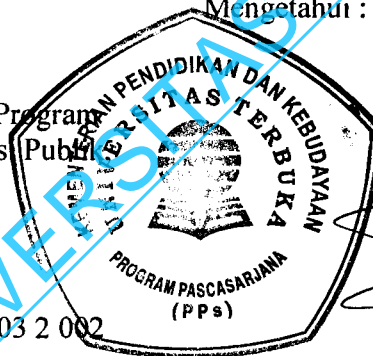
Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/Program
 Magister Adminstras Publik


Dra. Susanti, M.Si
 NIP.19671212 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana


Suciati, M.Sc., Ph.D
 NIP.19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : L.M.RAHIMIN.B
 NIM : 014639888
 PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik
 JUDUL TAPM : Implikasi Kebijakan Penataan Kota Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 4 Nopember 2011

Waktu : 10.00 – 12.00 Wita

Dan Telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Drs. Wawan Ruswanto, M.Si (.....)

Penguji Ahli

Nama : Prof.Dr.A.Aziz Sanapiah, MPA (.....)

Pembimbing I

Nama : Dr. Gunawan, M.Si (.....)

Pembimbing II

Nama : Prof.Buyung Sarita, SE,MS,Ph.D (.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta karunia nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, Sehingga penyusunan proposal ini dengan judul **“Implikasi Kebijakan Penataan Kota Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau ”**, dapat terselesaikan sebagai salah satu elemen penting dalam mencapai gelar magister pada program Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Secara khusus dari lubuk hati yang terdalam penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta H. Baharuddin. A dan Hj.Wa Ode Nuraini Kahar, semoga Allah SWT menganugerahkan kepada mereka kebaikan yang berlimpah, mensucikan mereka serta memberikan kehidupan yang terbaik bagi mereka di dunia maupun di akhirat kelak, Amien yaa rabbal alamin.

Pada kesempatan ini pula penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka dan Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Kendari selaku Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik beserta segenap tim pengajar dan staf akademik yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah berusaha memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan pelayanan administrasi yang baik dan lancar.

2. Ibu Suciati, Ph.D sebagai Asisten Direktur PPs Universitas Terbuka dan ibu Dra.Susanti,M.Si ketua bidang ilmu Program MAP yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian TAPM ini.
3. Bapak Dr. Gunawan,M.Si Selaku Pembimbing I dan Prof. Buyung Sarita, SE, M.S, Ph.D selaku pembimbing II, yang terus memberikan bantuan moril, motivasi, waktu dan wawasan yang luas serta mengarahkan penulis sehingga selesainya penulisan TAPM ini.
4. Bapak Bupati Buton, Ir. H. L.M. Sjafei Kahar,M.Si, atas bantuannya baik materi maupun imateri baik dalam proses kuliah maupun dalam menuntaskan penelitian ini.
5. Bapak Drs.MZ. Amirul Tamim,M.Si, selaku Walikota Kota BauBau yang bersedia memberikan izin penelitian ini, yang kemudian diarahkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota BauBau.
6. SITTI HARTINA MUSTARI, S.Si, Apt, istri tercinta yang memberi motivasi utama, yang secara sadar dan tidak sadar telah membangun kepribadian saya dengan segala perhatiannya yang besar, satu kata moga doa dan ketulusanmu menjadikan kita keluarga sakinah mawadah warahmah.
7. Saudara Penulis yang tercinta, L.M.RAHMAN.B, S.Si, L.M.RUSMAN.B, S.Farm,Apt, dr. WA ODE NURAHMANIAR,B, dan L.M. RAUF.B,S.STP atas segala dukungannya selama ini kepada penulis
8. *Especially to all my friends, I say thank's for support, honest prayer, loyalty and attention for me. I hope our frienship will be eternal forever.*

Semoga Allah SWT berkenan membelas budi baiknya dengan keberkahan yang berlimpah serta senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, Amin.

Kendari, Nopember 2011

L.M. RAHIMIN.B

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Abstract.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teoritik.....	9
1.Konsep Kebijakan.....	9
2.Kebijakan Penataan Kota.....	36
3.Konsep Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).....	59
B. Kerangka Berpikir.....	66
C. Definisi Konseptual	67
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	68
B. Subyek Penelitian	69
C. Instrumen Penelitian	69
D. Prosedur pengumpulan data.....	69
E. Teknik Analisis Data.....	70
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Gambar Umum Kota BauBau.....	71
1.1.Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah.....	71
1.2.Topografi dan Hidrologi	72
1.3.Kedaaan Demografis	73
1.4.Perdagangan dan Jasa	79
B. Kebijakan Penataan dan Pengembangan Kota Sebagai Wujud Visi Dan Misi Pemerintah Kota BauBau.....	83

C. Deskripsi Implikasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Bau Bau	93
D. Deskripsi Dampak Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Sisi Penataan Kota dan dari Sisi Pedagang Kaki Lima	107
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	110
A. Simpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN 1. Pedoman Wawancara Mendalam (Indepth Interview Guide).....	116
LAMPIRAN 2. Tabel Lampiran 1: Matriks SWOT Perkembangan Kota BauBau.....	129
LAMPIRAN 3. Tabel Lampiran 2: Matriks SWOT RDTR BWK-I Kota BauBau.....	130
LAMPIRAN 4. Tabel Lampiran 3: Matriks SWOT RDTR BWK-II Kota BauBau.....	131
LAMPIRAN 5. Tabel Lampiran 4: Matriks SWOT RDTR BWK-III Kota BauBau.....	132
LAMPIRAN 6. Tabel Lampiran 5: Matriks SWOT RDTR BWK-IV Kota BauBau.....	133
LAMPIRAN 7. Tabel Lampiran 6: Matriks SWOT RDTR BWK-V Kota BauBau.....	134
LAMPIRAN 8. Tabel Lampiran 7: Matriks SWOT RDTR BWK-VI Kota BauBau.....	135
LAMPIRAN 9. Tabel Lampiran 8: Fungsi Utama dan Fungsi Pendukung BWK Kota BauBau.....	136
LAMPIRAN10. Tabel Lampiran 9: Penggunaan Lahan Kota Bau Bau Tahun 2003.....	137
LAMPIRAN10.a. Tabel Lampiran 9.a.: Jumlah dan Data Penyebaran Fasilitas Perdagangan di Kota BauBau Tahun 2002.....	139

LAMPIRAN 11. Tabel Lampiran 10: Matriks Program Pembangunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota BauBau Jangka Menengah 2004-2008 dan Jangka Panjang Sampai 2013....	140
LAMPIRAN 12. Gambar Bagan Alir Penyusunan RDTR Kota Bau Bau.....	143
LAMPIRAN 13. Foto Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau.....	144
LAMPIRAN 14. Data Pedagang Kaki Lima Kota BauBau Tahun 2010	150
LAMPIRAN 15. Peta Kota BauBau	153

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir.....	66

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Strategi Perbaikan Jasa dan Pelayanan perkotaan Menurut Corolie Bryant, Louisa G. White.....	42
Tabel 2.2. Strategi Peningkatan Pendapatan dan Produktivitas Kelompok Miskin Perkotaan Menurut Corolie Bryant, Louisa G. White.....	43
Tabel 4.1. Batas Wilayah Kota BauBau Menurut Daerah	72
Tabel 4.2. Penduduk Kota BauBau Menurut Kecamatan Tahun 2001-2007..	74
Tabel 4.3. Jumlah dan Rata Rata Laju Pertumbuhan Kota BauBau Menurut Kecamatan Tahun 1990, 2000, 2007.....	75
Tabel 4.4. Kepadatan Penduduk Kota BauBau Menurut Kecamatan Tahun 1990, 2000, 2007.....	76
Tabel 4.5. Persebaran Penduduk Kota BauBau Menurut Kecamatan Tahun 1990, 2000, 2007.....	77
Tabel 4.6. Penduduk Kota BauBau Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1990, 2000, 2007.....	78

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika perkembangan berbagai sektor baik akibat kebijaksanaan pemerintah seperti Undang-Undang Pemerintahan yang tercantum pada UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta terjadinya perubahan tatanan perdagangan global yang telah diatur melalui berbagai kesepakatan antar berbagai negara yang sudah mulai diimplementasikan, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rencana penataan ruang Kota BauBau.

Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan pemerintah, mulai tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pengaturan dan pemanfaatan ruang kota harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang dikehendaki sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Dalam Penataan Ruang tersebut pada Bab II Asas dan Tujuan yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 mengandung inti bahwa penataan ruang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan (SDB) dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, dengan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dan di berbagai wilayah atau sub wilayah secara sinergis, serta tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Untuk terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan,

ruang merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan upaya pendayagunaan ruang yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. (RDTR Kota BauBau, 2003)

Pertambahan penduduk yang makin padat telah mengakibatkan munculnya sektor formal dan sektor informal dalam kegiatan perekonomian. Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks karena menyangkut jenis barang, tata ruang dan waktu. Sedangkan sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor informal ini umumnya berupa upaya berskala kecil dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas.

Keadaan ketenagakerjaan pada wilayah perkotaan di Indonesia biasanya dikaitkan dengan gejala pokok yaitu tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dan membengkaknya sektor informal yang ditandai dengan produktivitas dan penghasilan yang rendah. Pertumbuhan sektor informal juga disebabkan ketidakmampuan sektor formal menyerap lebih banyak tenaga kerja. Namun diduga bahwa banyak tenaga kerja masuk sektor ini karena terbatasnya kesempatan kerja dan pendapatan rendah di desa, dan sedikit diantaranya pindah ke kota dengan harapan mendapat gaji yang relatif tinggi disektor formal. Para pekerja disektor informal memiliki ciri yang berbeda dengan sektor formal yang pelakunya berasal dari pengangguran, yang banyak diantaranya berasal dari desa, berpendidikan rendah dan cukup banyak diantara mereka yang berusia tua serta sudah berkeluarga.

Kriteria utama sektor informal adalah mudah masuk kedalam aktivitas tersebut, usaha milik keluarga, beroperasi dalam skala kecil, intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana, sehingga sektor ini menjadi pilihan

pekerjaan yang cukup rasional bagi masyarakat perkotaan. Sektor informal dianggap sebagai manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah perkotaan. Mereka yang memasuki kegiatan usaha berskala kecil di kota, bertujuan mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan.

Nampaknya sektor informal merupakan pilihan yang rasional dan mudah dimasuki bagi kaum marginal, untuk bertahan hidup di kota yang bukan hanya sekedar kompetitif, tetapi membutuhkan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Sektor ekonomi informal diperkotaan merupakan klaster masyarakat yang cukup rentan terkena imbas dari berbagai kebijakan. Pada umumnya sektor ini merupakan ruang terbuka bagi kelompok marginal kota untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan dalam batas subsistensi. Mereka adalah Pedagang Kaki Lima, Pedagang Asongan, buruh dan lain sebagainya.

Pedagang Kaki Lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud dalam sektor informal. Pedagang Kaki Lima adalah orang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Adapun beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu menempati kawasan yang bukan diperuntukannya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima sebagai pelaku kegiatan ekonomi marginal (marginal economy activities), biasanya memberi kesan yang kurang baik terhadap kondisi fisik kota. Misalnya kesemrawutan, jalanan macet, kumuh dan lain

sebagainya. Kondisi ini menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk melakukan penggusuran ruang publik kaum marginal. Di samping itu Pedagang Kaki Lima juga sulit untuk di atur ataupun di relokasikan.

Dilain pihak kegiatan pedagang kaki lima tersebut ternyata memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan mempertimbangkan keadaan dan potensi tersebut, selayaknya pola penanganan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima harus didasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik berwawasan lingkungan agar isi pengaturannya tepat yang disertakan dalam penataan pedagang kaki lima lebih baik.

Permasalahan penataan ruang perkotaan yang sering kali muncul dan sulit diantisipasi umumnya disebabkan oleh lemahnya fungsi koordinasi. Selain itu, penataan ruang umumnya bersifat makro dan sulit di implementasikan oleh masyarakat selaku pengguna ruang sehingga seringkali terjadi perbedaan persepsi yang pada akhirnya membuka peluang untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan penataan ruang. Perkembangan yang ada sekarang ini menuntut kita untuk mengubah pola pikir, pola sikap dan dan pola tindak kearah yang lebih kreatif dan dinamis sehingga mampu mengantisipasi dan menjawab berbagai konflik kepentingan terhadap tuntutan kebutuhan ruang oleh masyarakat.

Pemerintah kota dituntut melakukan penyusunan perencanaan yang terpadu untuk memberikan tempat yang strategis bagi PKL dalam menjalankan fungsinya melalui peremajaan kawasan perdagangan, serta menangani secara baik tempat-tempat

dimana PKL tumbuh secara alami. Dalam posisi ini Pemkot dapat berfungsi sebagai kekuatan politik, administratif dan mediator berbagai pihak. Ini berarti permasalahan PKL bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah kota, tetapi tidak berarti pula bahwa pemerintah kota tidak tanggap terhadap permasalahan PKL.

Sektor informal ini juga memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat tingkat marginal. Bahkan apabila diamati mereka memiliki omzet pendapatan yang cukup. Selain itu mereka juga memberikan andil kepada pendapatan daerah berupa retribusi yang tentunya potensi yang cukup besar. Sehingga seharusnya keberadaan Pedagang Kaki Lima harus menjadi perhatian dan penanganan yang serius bagi pemerintah. Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi rakyat ini dapat dibina dan dikembangkan sebagai pondasi pembangunan perekonomian nasional.

Di perkotaan, sektor informal tidak pernah terakomodasi dalam kebijakan perencanaan dan penataan ulang kota. Aksi penertiban atau pengusuran tempat usaha sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh aparat kota sudah menjadi menu rutin dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota-kota besar di Indonesia dalam rangka membuat wajah kota lebih ramah untuk penghuninya. Padahal, saat krisis melanda negara tahun 1997, sektor informal terbukti mampu menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi peredam (buffer) gejolak di pasar perkotaan dengan menampung limpahan jutaan buruh korban pemutusan di sektor formal. Keberadaan sektor informal membuat angka pengangguran dan kemiskinan tidak meledak sedahsyat yang ditakutkan.

Tugas administrasi utama pemerintah kota di negara berkembang terkait dengan pengelolaan wilayah perkotaan ialah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanannya, termasuk dalam penyediaan fasilitas publik.

Salah satu tugas utama dari pemerintah kota ialah penyediaan barang dan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Terdapat empat pendekatan umum yang dapat ditempuh pemerintah dalam menyediakan barang dan pelayanan publik, yaitu dari sisi penawaran, dari sisi permintaan, pengenaan sanksi dan produksi bersama. Pendekatan dari sisi penawaran yaitu umumnya pemerintah dapat menyediakan secara langsung bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat pendekatan dari sisi permintaan yaitu pemerintah menciptakan rangsangan permintaan melalui mekanisme pasar sehingga barang ataupun pelayanan publik diberikan kepada masyarakat secara tidak langsung. Pendekatan dari sanksi hukum, yaitu pemerintah memberikan sanksi hukum, misalnya berupa denda karena tidak memproduksi sesuai ketentuan. Sedangkan pendekatan keempat, pengadaan pelayanan dihasilkan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Pada pendekatan keempat ini misalnya, pemerintah menyediakan sejumlah tertentu dari kebutuhan pendanaan, sedangkan sisanya ditanggung bersama oleh penduduk sebagai suatu bentuk swadaya masyarakat. Tantangan besar untuk pemerintah kota, sesungguhnya ialah menciptakan berbagai cara memenuhi kebutuhan pokok melalui pendekatan swadaya.

Sektor informal sering dijadikan kambing hitam dari penyebab kesemrawutan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan. Meskipun demikian sektor informal sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri, atau menjadi *safety belt* bagi tenaga

kerja yang memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah kebawah. Pada umumnya sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup *survive* dibandingkan dengan sektor usaha yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal relatif lebih independen atau tidak tergantung dari pihak lain khususnya menyangkut permodalan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya.

Adanya implikasi kebijakan penataan kota relokasi Pedagang Kaki Lima dan bagaimana relokasi di implementasikan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implikasi kebijakan penataan kota di Kota BauBau
2. Bagaimana pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan penataan tata kota di Kota BauBau
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan mengkaji pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Kota BauBau ditinjau dari Pengadaan Lokasi Pedagang Kaki Lima, Pengaturan Pedagang Kaki Lima dan Penempatan Pedagang Kaki Lima.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Penelitian sebagai teori, kegunaan ini dimaksudkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya berhubungan dengan Administrasi Publik
2. Kegunaan Penelitian sebagai kegunaan praktis sebagai sumbangsih ilmu bagi pemerintah kota dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Konsep Kebijakan

Di dalam Ilmu Administrasi Negara, studi mengenai kebijakan (*policy*) menjadi sangat populer namun sebagian besar masih dikaji secara deskriptif dan masih sangat sulit membangunnya. Setapak demi setapak para peneliti memulai untuk menggeneralisasikan dan membangun teori tentang proses pengambilan kebijaksanaan pemerintah (*public policy making*) dengan menggunakan model-model yang dikembangkan dari bidang studi lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Simon (1998:200) bahwa *policy* ini dipandang sebagai studi yang bisa di terapkan dengan ilmu-ilmu sosial.

Dalam arti yang luas, Thoha (2003:56-58) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) mengandung dua aspek pokok yaitu :

1. *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam itu tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat
2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan untuk mendamaikan (*policy claim*) dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan (*incetunce*) bagi tindakan bersama pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi

mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian jika ada pihak konflik, maka usaha untuk mengatasinya antara lain dihasilkan dengan kebijakan. Jika terjadi beberapa pihak yang bersama-sama ikut menentukan tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi dalam perjalanannya ada pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sama atau tidak rasional, maka diambil suatu tindakan yang berupa kebijakan yang dapat mendorong agar diciptakan situasi yang rasional. Kebijakan semacam ini merupakan dorongan atau insentif bagi pihak yang sudah sepakat sudah menentukan tujuan bersama untuk bekerja sama secara rasional.

Dari suatu aspek pokok tersebut disimpulkan bahwa kebijakan di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, dilain pihak kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik yang dapat menimbulkan dampak atau pengaruh.

Claswell dan Kaplan (1990:71) menegaskan *policy* dapat dipandang sebagai suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika.

Prewitt (1993:436) mengemukakan bahwa kebijakan atau *policy* adalah suatu keputusan yang teguh yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya, yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya.

William N. Dunn (1999) menjelaskan analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan.

Menurut Dye (1981) *public policy is whatever government choose to do or not to do*, yang mengandung arti bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Kebijakan Publik walaupun berakar dari ilmu politik, bukanlah monopoli ilmu politik semata, namun demikian ilmu kebijakan publik ini telah berlangsung dengan pesat sesuai dengan tuntutan jaman, bahkan ruang lingkup kebijakan publik meliputi hampir seluruh kehidupan masyarakat selaras dengan peran regulasi pemerintah untuk mengatur sebuah permasalahan, khusus sejalan dengan perkembangan ini setidaknya ada 3 (tiga) dasar signifikansi studi kebijakan publik yaitu :

- a. Kenyataan tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin banyak dan beragam memerlukan suatu kajian berupa *research and development* sebelum kebijakan publik ditetapkan. Hal ini kemudian menimbulkan disiplin analisis yang oleh William Dunn diyakini sebagai salah satu kunci dasar bagi arti penting pembuatan kebijakan publik, yang dibuat dengan tidak berdasarkan pada beragam model-model pengkajian yang mendalam diyakini hanya akan menimbulkan *in efisiensi*, tidak tepat sasaran dan sekaligus efisiensi
- b. Dibutuhkannya kemampuan yang mendalam bagi para pengambil kebijakan. Kebijakan publik (policy maker) analisis kebijakan publik (policy analisis) dan juga penasehat (policy adviser) mendorong arti penting dan studi dan pemahaman mengenai kebijakan publik saat ini. Keterbatasan dan berbagai bentuk konstrain yang dihadapi pengambil keputusan (bureaucratic dan administration public) misalnya seperti sumber daya manusia dan juga keterbatasan waktu untuk

mengkaji secara mendalam proposal kebijakan menghasilkan perlunya pemahaman kebijakan publik dikuasai secara mendalam

- c. Perkembangan global yang bermuara pada kompetisi dan implementasi model pasar yang berkembang pesat membutuhkan perlunya kebijakan publik disusun secara strategis dalam rangka menghadapi, berbagai persoalan yang melingkupi baik bersifat internal maupun eksternal

Menurut Keban (2008 :60) kebijakan publik tersebut dapat dibedakan ke dalam :

- a. Bentuk *regulatory* yaitu mengatur perilaku orang
- b. Bentuk *redistributive* yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikan kepada yang miskin
- c. Bentuk *distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu
- d. Bentuk *constituen* yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara

Dari berbagai penjelasan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa orientasi kebijakan sangat *concern* kepada masyarakat dan bagaimana memberdayakan serta memecahkan masalah publik. Dibutuhkan kebijakan publik yang mampu mengembangkan, memberdaya dan kemandirian bagi masyarakat yang masih kurang berdaya.

Selanjutnya Dunn menjelaskan metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu :

1. Definisi menghasilkan informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan

2. **Prediksi** menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu
3. **Preskripsi** menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan dimasa mendatang
4. **Deskripsi** menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan
5. **Evaluasi** kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masa

Kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan atau langkah tindakan didalamnya terdapat proses yang memvisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu. Dunn (2003 : 22-25) membagi proses pembuatan kebijakan kedalam lima tahapan :

a. **Penyusunan Agenda Kebijakan**

Pada tahap penyusunan agenda ini, harus ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. (Dunn, 2003 : 226) mengemukakan bahwa perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung, yaitu pencarian masalah (problem solving search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah (problem specification) dan pengenalan masalah (problem sensing)

b. **Formulasi Kebijakan**

Pada fase ini, para analisis mulai mengaplikasikan beberapa teknik analisis dalam upaya memperoleh suatu keyakinan bahwa sebuah pilihan kebijakan adalah lebih baik dari yang lain. Untuk itu dapat digunakan perangkat seperti analisis biaya dan manfaat, analisis keputusan dimana keputusan harus diambil dalam ketidakpastian

dan keterbatasan informasi. Dalam konteks ini, penekanannya lebih pada pembahasan tentang alternatif – alternatif apa saja yang dapat dikembangkan dan berkaitan dengan masalah siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Untuk itu dibutuhkan *forecasting*, sehingga akan dihasilkan masa depan kebijakan (*policy future*) berikut konsekuensi masing-masing kebijakan tersebut

c. Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini ditentukan pilihan-pilihan kebijakan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga setelah melalui proses rekomendasi

d. Implementasi Kebijakan

Tahap ini berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program. Pada tatanan ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah terseleksi. Tahap implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang atau peraturan ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2008 : 144-145)

e. Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap pelaksana kebijakan, apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap ini juga dilakukan evaluasi guna mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005 : 99) ada enam variabel yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan timbul interpretasi dan mudah menunjukkan konflik diantara para agen implementasi
- b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya dan non manusia (non human resources)
- c. Hubungan antar organisasi dan banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain untuk itu diperlukan koordinasi dengan instansi lain untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama instansi bagi keberhasilan suatu program
- d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud dengan agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi suatu program
- e. Koordinasi sosial, politik ekonomi variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan: sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan

- f. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni (a) respon implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan; dan (c) intensitas implementator, yakni *prefensi* nilai yang dimiliki implementator.

Menurut Salusu (1996 : 409) implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam melakukan kegiatan tersebut diperlukan keterlibatan banyak orang, sumber dana, keterampilan, dan juga memerlukan seorang pemimpin yang mampu membawa organisasi tersebut mencapai sasaran.

Menurut George Edward dalam Winarno (2002 : 124) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi suatu masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mengalami kegagalan sekalipun diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan itu kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Kebijakan publik menurut Easton (1973 : 128) adalah alokasi nilai untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintah lah yang dapat berbuat untuk seluruh

masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Dengan kata lain, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan (whatever government choose to do or no to do). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari publik tidak hanya pada apa yang dilakukan oleh pemerintah, justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah melakukan banyak hal lewat proses pengambilan kebijakan. Pemerintah dapat mengatur konflik yang terjadi dalam masyarakat dan menata birokrasi untuk melaksanakan konflik tersebut. Pemerintah dapat juga melakukan distribusi aneka macam simbol-simbol penghargaan dan bantuan pelayanan materi terhadap anggota masyarakat. Selain itu *public policy* dapat pula menangani aneka bidang cakupan substansi, seperti pertahanan keamanan, energi, lingkungan, masalah-masalah luar negeri dan lain-lain. *Public policy* dapat juga mengatur masalah-masalah vital sampai dengan masalah-masalah yang kurang penting.

Menurut Ndraha (1990) : 493) bahwa lokus kebijakan dalam proses pemerintahan adalah pilihan-pilihan berupa masukan (input) dari lingkungan setelah diproses, menjadi bahan mentah (policy agenda) buat proses pembuatan kebijakan (policy formulation).

Jika kebijakan sudah diterapkan (policy adaptations), maka tidak ada kebijakan lain atau kebijakan alternatif (alternative policy). Namun demikian, dalam proses

implementasi kebijakan terdapat alternatif tentang instrumen, cara dan gaya sesuai dengan kondisi implementasi kebijakan.

Struktur kebijakan di lingkungan pemerintahan, tersusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sistem nilai pemerintahan, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa sampai dengan nilai keteladanan perilaku diri sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana halnya yang dikatakan Ndraha (1990 : 498) bahwa kebijakan pemerintah adalah pilihan terbaik usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungannya.

Selanjutnya Ndraha (1990 : 498) unsur-unsur penting di dalam kebijakan pemerintahan adalah :

- a. Kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dari hasil penelitian filsafat pemerintahan, teologi pemerintahan dan sebagainya
- b. Kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan kependudukan, inputnya berasal dari penelitian demografi pemerintahan, geografi pemerintahan dan lain-lain
- c. Kebijakan pemerintah berdasar pertimbangan kemasyarakatan inputnya dari hasil penelitian sosiologi pemerintahan, ekonomi pemerintahan dan sebagainya
- d. Kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan kebangsaan, inputnya dari penelitian budaya pemerintahan, sosiologi pemerintahan, publik pemerintahan, hukum pemerintahan dan sebagainya
- e. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan kenegaraan, inputnya berasal dari penelitian politik pemerintahan, hukum pemerintahan dan lain sebagainya

- f. Kebijakan pemerintahan berdasarkan pertimbangan, ekologi pemerintahan, seni pemerintahan, etika pemerintahan, bahasa pemerintahan, teknologi pemerintahan dan sebagainya

Menurut Moekijat (1995 : 5) agar kebijakan dapat mengenai sasaran dan memberi manfaat terhadap publik dibutuhkan analisis kebijakan. Analisis kebijakan suatu bentuk riset terapan yang dilakukan untuk memperoleh pengertian tentang masalah-masalah sosial teknis yang lebih dalam dan untuk menghasilkan pemecahan-pemecahan yang lebih baik.

Dengan berusaha menggunakan ilmu dan teknologi modern yang berhubungan dengan masalah-masalah masyarakat, analisis kebijakan mengadakan penyelidikan untuk mendapatkan cara bertindak yang mungkin menghasilkan informasi-informasi dan menyusun fakta-fakta keuntungan dan akibat-akibat lain yang akan mengikuti penerimaan dan pelaksanaannya, untuk membantu pengambil kebijaksanaan memilih tindakan yang paling menguntungkan.

Manfaat dari analisis kebijakan adalah untuk menjajaki variasi arti dari konsep analisis kebijaksanaan. Analisis untuk kebijakan publik berusaha memperbaiki pengambilan keputusan dalam suatu situasi khusus, misalnya perbaikan proses pengambilan kebijakan publik melalui pendidikan atau perbaikan legislatif di luar ruang lingkup kita. Meskipun ini mungkin menjadi subjek dari suatu analisis kebijakan. Istilah analisis kebijakan diterapkan baik terhadap proses (atau kegiatan) maupun hasil dari kegiatan tersebut. Dengan demikian analisis kebijakan banyak menghasilkan analisis kebijaksanaan (Moekijat : 1995 : 7)

e. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan

Menurut kamus Webster sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Wahab (2004 : 64) dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu. Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

Menurut Salusu (1996 : 409) implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk menyusun satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam melakukan kegiatan tersebut diperlukan keterlibatan banyak orang, sumber dana, keterampilan dan juga memerlukan seorang pemimpin yang mampu membawa organisasi tersebut mencapai sasaran.

Proses pelaksanaan tugas dalam pemerintahan menurut Imawan (1996 : 6) mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai satu rangkaian kegiatan implementasi kegiatan yang bersifat mendukung atau komplementer terhadap kegiatan yang lain. Lima aktivitas tersebut sangat penting dalam satu kegiatan implementasi :

- a. Reinterpretasi tujuan kebijakan agar dapat dipahami pelaksanaan pelaporan
- b. Operasionalisasi rencana sehingga setiap aktivitas dapat dicapai dengan cara-cara yang efisien
- c. Kesiapan organisasi mulai dari pelaksanaan hingga sarana pendukung

- d. Kesesuaian antara sumber tenaga dan sumber biaya yang tersedia
- e. Melakukan pemantauan terhadap setiap perubahan aspirasi dalam masyarakat

Selanjutnya menurut Daniel A. Mamanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin (2004 : 68) *implementasi is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the program (s) to be addressed, stipulates objective (s) to be pursued, end in the variety of ways, structures the implementation process.* Yang berarti implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula terbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002 : 12) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sebagai proses kegiatan tindakan-tindakan individu atau kelompok menimbulkan macam-macam keputusan yang berbeda. Perbedaan ini akan menunjukkan karakteristik, struktur dan hubungan-hubungan antar implementator yang mempengaruhi kebijakan tersebut sehingga proses implementasi juga akan mengalami perbedaan.

Menurut George Edward dalam Winarno (2002:124) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-

konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan itu kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan kebijakan sebelumnya. Kebijakan yang ditetapkan oleh pengambil keputusan bukan merupakan kebijakan yang berkelanjutan. Bahwa ini dapat terjadi karena dua hal yakni : pertama, sejauh mana implementasi kebijakan menyimpang dari rumusan kebijakan akibat perubahan implementasi yang cenderung menimbulkan perubahan-perubahan tujuan lain. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan (Lindlom, 1980)

Menurut Solichin (2004:78) mengatakan bahwa adanya perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang akan dilaksanakan. Menurut kedua ahli ini bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang berkaitan. Variabel-variabel bebas itu adalah :

- a. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
- b. Sumber-sumber kebijaksanaan
- c. Ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana
- d. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- e. Sikap dan para pelaksanaan

f. Lingkungan ekonomi , sosial dan politik

Tindakan implementasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Wood dan Gun (1995) terdapat dua faktor dominan yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan suatu program yaitu : *non implementation* dan *unsuccesfull implementation*. Tidak terimplementasi mengandung makna bahwa suatu program tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, hal tersebut disebabkan oleh karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau berkerja sama, atau bekerja tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau karena permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapa gigih pun usaha mereka hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulasi. Sementara itu *unseccesfull implementation* biasanya juga terjadi jika suatu kebijakan tertentu dilaksanakan sesuai rencana namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan.

Selanjutnya menurut Edward III (Abdullah, 1988 : 400) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor antara lain adalah :

I. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam

Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair)
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hirarkinya
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian

waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya,

semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno, 2005:153-154)

Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk. *Kedua*, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam *information, material, equipment, facilities, money, people*. Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: *human resources, material resources, financial resources and information resources*". Pengelompokan ini diturunkan pada pengkategorian yang lebih spesifik yaitu

sumberdaya manusia ke dalam *human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc.* Sumberdaya material dikategorikan ke dalam *material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc.* Sumberdaya finansial digolongkan menjadi *financial resources-cash on hand, debt financing, owner`s investment, sale reveue, etc.* Serta sumber daya informasi dibagi menjadi *data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc.*

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari *staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies.* Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan *insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed.* Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologi, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159) sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan
2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan
3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya

4. **Fasilitas.** Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang zona ketidakacuhan dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat

yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat
2. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi

4. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157) komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu atau mendua.
3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005:127) terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hirarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam menilai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Untuk menjabarkan distorsi atau hambatan komunikasi yakni proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk itu, Winarno (2005:129) menyimpulkan semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi interpretasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Keempat faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan proses implementasi dan saling mempengaruhi antara satu faktor dengan yang lainnya yang saling mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Evaluasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada tercapainya indikator-indikator pelaksanaan

kebijakan, yang dapat diukur dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun *outcome* kebijakan.

Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, dapat dimengerti apabila banyak kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tahap terakhir dari proses kebijakan adalah melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri (Anderson, 1997: 272).

Menurut Dunn (1994) Kriteria dalam rangka mengevaluasi suatu kebijakan adalah:

1. Efisiensi. Suatu kebijakan dikatakan efisien jika hasil (output atau outcomes) lebih besar dari pada biaya untuk implementasi serta penegakan hukum kebijakan tersebut. Artinya, yang digunakan adalah kriteria *cost-effectiveness*, dengan kata lain, suatu kebijakan bersifat efisien, maka pasti *cost-effectiveness*, tetapi tidak sebaliknya

2. Keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan adalah pembagian atau penyebaran keuntungan, yang diperoleh dari suatu kebijakan, di antara kelompok masyarakat atau stakeholders
3. Insentif untuk perbaikan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mendorong para *stakeholders* untuk mencari dan menerapkan pendekatan atau teknologi untuk perbaikan
4. Kemudahan untuk penegakan hukum (enforceable). Dapat atau tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan serta ditegakkan
5. Pertimbangan moral

2. Kebijakan Penataan Ruang Kota

Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui UU No.24 Tahun 1992 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya. Berdasarkan UU No.24 Tahun 1992, khususnya pasal 3, termuat tujuan penataan ruang, yakni terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya.

Adapun sasaran penataan ruang adalah :

1. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera
2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
3. Mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kesejahteraan dan keamanan

4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan

Sesuai dengan UU 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, sistem perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan secara berhirarkis menurut kewenangan administratif, yakni dalam bentuk RTRW Nasional, RTRW propinsi dan RTRW kabupaten/kota serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci. RTRWN disusun dengan memperhatikan wilayah nasional sebagai satu kesatuan wilayah yang lebih lanjut dijabarkan kedalam strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang pada wilayah propinsi (RTRWP), termasuk di dalamnya penetapan sejumlah kawasan tertentu dan kawasan andalan yang diprioritaskan penanganannya. Aspek teknis perencanaan tata ruang wilayah dibedakan berdasarkan hirarki rencana.

RTRWN merupakan perencanaan makro strategis jangka panjang dengan horizon waktu hingga 25 - 50 tahun ke depan dengan menggunakan skala ketelitian 1 : 1.000.000. RTRW Propinsi merupakan perencanaan makro strategis jangka menengah dengan horizon waktu 15 tahun pada skala ketelitian 1 : 250.000. Sementara, RTRW Kabupaten dan Kota merupakan perencanaan mikro operasional jangka menengah (5-10 tahun) dengan skala ketelitian 1 : 20.000 hingga 100000, yang kemudian diikuti dengan rencana-rencana rinci yang bersifat mikro operasional jangka pendek dengan skala ketelitian dibawah 1 : 5.000.

Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, membedakan kawasan perkotaan atas :

1. Kawasan perkotaan yang berstatus administratif daerah kota
2. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten
3. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan
4. Kawasan perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih wilayah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan

Pengembangan wilayah perencanaan harus sesuai dengan fungsi jasa pelayanan yang di emban Kota BauBau. Keberadaan Kota BauBau perlu didayagunakan secara optimal dan terpadu untuk mendukung perannya sebagai salah satu pusat kegiatan dan pelayanan di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun dalam skala yang lebih luas. Kota BauBau sebagai wilayah perencanaan juga harus diantisipasi untuk mengakomodasi berkembangnya prasarana penunjang dalam melayani kebutuhan fasilitas dengan berkembangnya berbagai sektor kegiatan. Dalam hal ini termasuk pula pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara.

Tujuan penyusunan RDTRK-BB 2004-2013 adalah:

- a. Tujuan umum RDTRK-BB yang wilayahnya berupa BWK I, II, III, IV, V dan VI ini adalah untuk menjabarkan RTRWK-BB dalam rencana-rencana mendetail dengan menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan, sebagai penjabaran kegiatan ke matra ruang dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional, agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dengan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

b. Tujuan khusus RDTRK-BB adalah untuk:

1. Mewujudkan tata ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan perkotaan
2. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan RTRW perkotaan
3. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien
4. Menjaga konsistensi perwujudan ruang perkotaan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan
5. Menciptakan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang sebagai salah satu faktor penting untuk mengkondisikan kemandirian partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan penanaman investasi pembangunan
6. Menjadi landasan bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam penataan ruang masing-masing BWK di Kota BauBau

Sasaran penyusunan RDTRK-BB 2004-2013 adalah:

- a. Tersusunnya RDTRK-BB yang sinkron dengan kebijakan pemerintah tentang kemungkinan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kota
- b. Terwujudnya tatanan blok-blok kawasan Kota BauBau yang sesuai dengan potensi, kendala, karakteristik, fungsi dan pemanfaatan ruangnya
- c. Tersusunnya matriks program kegiatan penataan ruang di seluruh BWK Kota BauBau selama periode 2004-2013

Manfaat penyusunan RDTRK-BB 2004-2013 adalah:

- a. Sebagai rujukan pemberian *advice planning*
- b. Sebagai rujukan pemberian ijin pembangunan bangunan dan non bangunan

- c. Sebagai rujukan penyusunan kriteria pengaturan bangunan setempat
- d. Sebagai rujukan operasional baik dalam pelaksanaan pembangunan suatu kawasan maupun pengelolaan kawasan
- e. Dapat digunakan sebagai informasi matra ruang bagi para pengusaha lokal, regional, nasional maupun internasional dalam usaha penanaman investasi di Kota BauBau sesuai rencana penataan ruang masing-masing BWK
- f. Sebagai rujukan penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan atau rencana tata bangunan dan lingkungan

Dasar hukum dan kebijakan yang mendasari penyusunan RDTRK-BB, antara lain adalah

1. UU No. 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186)
2. UU No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437)
3. UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 27, Tambahan Lemb. Negara Nomor 3470)
4. UU Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang
5. UU Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman
6. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah
8. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
9. Kepres No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

10. Kepres No. 33 Tahun 1991 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri
11. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang
12. Edaran Mendagri Nomor 050/1240/II/BANGDA/, Tanggal 21 Juni 2001, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi, Kabupaten dan Kota
13. Surat Edaran Mendagri Nomor 05/1307/II/bangda, Tanggal 11 Agustus Tahun 2002, tentang Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP)
14. Kepmenkimpraswil No. 327 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Kawasan Perkotaan
15. Renstra, Propeda, dan Poldas Kota BauBau Tahun 2000-2004
16. RTRW Kota BauBau Tahun 2002-2012.

Sullivan (1996) mengemukakan dua aspek pengembangan perkotaan yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif adalah bahwa kota berfungsi sebagai fasilitator dari hasil produksi dan perdagangan. Kota menyediakan berbagai jenis barang dan pekerjaan. Hal tersebut akan mendorong peningkatan standar hidup masyarakat kota setempat. Selanjutnya aspek negatif dari pengembangan perkotaan yaitu berkembangnya masalah kemiskinan, kongesti (kemacetan) permukiman, polusi dan kriminalitas.

Coralie Bryant, Loisse G. White mengemukakan ada berbagai pilihan cara yang dimiliki pemerintah kota tanpa keharusan untuk menggunakan anggaran dalam jumlah besar. Sejumlah pilihan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah kota sebagai bagian

dari strategi untuk menanggapi pertumbuhan perkotaan. Biasanya pemerintah kota memiliki kekuasaan yang memadai untuk melaksanakan pendekatan ini. Strategi perbaikan jasa dan pelayanan perkotaan menurut Coralie Bryant, Louise G. White digambarkan seperti pada tabel 2.1. berikut ini :

NO	BIAYA RENDAH	BIAYA MENENGAH
1.	Mengorganisasi kemampuan daerah dalam membangun dan mengurus berbagai fasilitas daerah	1. Penyediaan utilitas umum pada tingkat minimal (air, listrik) dengan pengenaan biaya untuk pemakaian diatas standar minimal.
2.	Mendukung dan melatih staf untuk pemberdayaan masyarakat didaerah	2. Peningkatan swadaya masyarakat, misalnya melalui penjaminan hak milik di kawasan perumahan yang dibangun secara swadaya
3.	Pengorganisasian berbagai proyek pelatihan, seperti yang berkenaan dengan bidang kesehatan atau keterampilan kerja	3. Membuka akses pada kredit bergilir untuk meningkatkan fasilitas pada pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia non pemerintah
4.	Mengawasi kebijakan lokasi industri yang berpengaruh pada kesempatan kerja dan pelayanan (publik dan pelayanan (publik dan swasta)	4. Meningkatkan peran koperasi dalam mendukung penyampaian pelayanan publik
5.	Peningkatan jumlah proyek daerah yang dibiayai pusat	5. Memberikan bantuan bagi berbagai kelompok lokal yang memberikan kontribusi dalam penyampaian pelayanan public
6.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai program daerah	
7.	Meninjau ulang berbagai peraturan daerah yang menghambat penyampaian pelayanan publik oleh pemerintah daerah	
8.	Melatih tenaga terampil (para profesional) dalam bidang yang sangat penting (seperti tenaga kesehatan)	

Sumber : Coralie Bryant, Louisa G. White, Manajemen Pembangunan. (1982)

Coralie Bryant, Louisa G. White mengemukakan pula strategi peningkatan pendapatan dan produktivitas kelompok miskin perkotaan dalam tabel 2.2 berikut ini :

No.	Biaya Rendah	Biaya menengah
1.	Merevisi lisensi lisensi yang membatasi penyerapan tenaga kerja	Menyediakan fasilitas kredit bagi perusahaan perusahaan berskala kecil
2.	Meninjau kembali peraturan tata guna tanah yang menghambat penyerapan tenaga kerja lokal	Mengadakan program latihan manajemen berskala kecil bagi para pengusaha
3.	Meninjau kembali peraturan lokal yang membatasi pedagang keliling	Menuntut perusahaan yang beroperasi di wilayah untuk menyelenggarakan latihan
4.	Mendukung swadaya pengembangan fasilitas kios penitipan anak	Membagikan kupon transportasi pemasaran barang

Sumber : Corolie Bryant, Louise G. White, Manajemen Pembangunan, (1982)

Pola Tata guna lahan di perkotaan mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Tata guna lahan ditentukan oleh skala ekonomi dan aglomerasi. Karena itu jarang ditemui tipe kota dengan bagian pusat yang kosong. Hal yang terjadi ialah bagian pusat padat, dan semakin menjauh dari pusat maka semakin kurang kepadatannya
2. Orang lebih menyukai tempat yang dekat dengan semua kegiatan karena biaya transportasi tergantung terutama pada jarak yang harus ditempuh
3. Orang juga tergantung pada sifat lingkungannya. Semakin sesuai sebuah lingkungan dengan harapannya, semakin tinggi harga yang rela dibayarkan

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan bukan saja dilihat sebagai kota secara individual,

perkembangan perkotaan dicirikan oleh semakin berperannya masyarakat dari dunia usaha dalam mengarahkan kegiatan dan investasi pembangunan perkotaan.

Penataan Ruang Kota BauBau dikelompokkan dalam dua Kondisi yaitu Kondisi Fisik dan Kondisi non Fisik

A. Kondisi Fisik

Kondisi fisik yang dimaksud meliputi kondisi fisik alamiah dan kondisi fisik buatan yang berpengaruh dalam penyusunan RDTRK-BB

1. Kondisi Fisik Alamiah

Berdasarkan RTRW Kota BauBau, secara administratif Kota BauBau pada mulanya terdiri dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Wolio dan Betoambari dengan 23 kelurahan dan luas sekitar 6.111 Ha. Namun sejalan dengan perkembangan kota dan tuntutan peningkatan status menjadi kota otonom Kecamatan Bungi dan Sorawolio yang sebelumnya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Buton dimasukkan menjadi bagian dari Kota BauBau sehingga luas wilayah bertambah menjadi 28.060,10 Ha dan jumlah desa dan kelurahan bertambah menjadi 38 desa dan kelurahan.

Kota BauBau merupakan salah satu kota dari 10 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang relatif baru terbentuk sebagai hasil pemekaran Kabupaten Buton berdasarkan pembentukannya, UU No. 13 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota BauBau menjadi sebuah daerah otonom yang saat ini memiliki enam wilayah kecamatan yakni Kecamatan Wolio, Kecamatan Betoambari, Kecamatan Sorawolio dan tambahannya Kecamatan Kokalukuna, Kecamatan Murhum dan Kecamatan Lea

Lea. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi maupun kemasyarakatan. Berbagai program pembangunan yang direncanakan secara bertahap telah memberikan perubahan sebagai daerah otonom kemudian membawa implikasi yang sangat luas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan sebagai perwujudan kemandirian daerah otonom, sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Guna mengantisipasi dinamika perkembangan Kota BauBau yang semakin dinamis, maka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kota BauBau perlu dilakukan secara integral melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota BauBau. Hal ini ditujukan agar terjadi kesesuaian antara penggunaan ruang terhadap kapasitas maksimal daya tampung Kota BauBau guna menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan baik dari segi fungsi dan intensitas penggunaan tanah antar bagian wilayah kota maupun dalam satu bagian wilayah kota. Disamping itu, ditujukan pula bagi upaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan sarana dan prasarana kota perkotaan sesuai dengan jenjang fungsinya masing- masing.

Dalam Penataan ruang kota, masing masing satuan sistem pelayanan memiliki kedudukan yang penting sebagai dasar perencanaan yang lebih detail. Satuan yang berupa Bagian Wilayah Kota (BWK) yang dikelompokan sesuai kesamaan fungsi, adanya pusat tersendiri, kedekatan aksesibilitas, dan batasan-batasan maupun fisik dan administrasi. Rencana pembagian BWK, penetapan fungsi, dan pusat pelayanannya di Kota BauBau adalah sebagai berikut :

1. BWK I meliputi seluruh Kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan. Secara administrasi BWK I meliputi Kelurahan Wale, Tomba, Bataraguru, Wangkanapi, dan Bukit Wolio Indah. Fungsi utama yang dikembangkan meliputi perkantoran swasta, pusat perdagangan, jenis jasa dan perdagangan grosir dengan skala pelayanan regional dan kota. Sebagai pusat pelayanan ditunjuk Kelurahan Wale.
2. BWK II dikembangkan dengan fungsi pendukung perdagangan grosir, dan perdagangan eceran. Secara fisik BWK ini dibatasi oleh sungai BauBau di bagian timur dan meliputi Kelurahan Kaobula, Nganganaumala, Lanto, Wajo, Melai, Lamangga, Tarafu, Wameo, Bone Bone, dan Tanganapada. BWK ini dipusatkan di Kelurahan Wameo
3. BWK III dikembangkan dengan fungsi sebagai kawasan pusat pendidikan tinggi dan pusat pemerintahan kota. Dikembangkan dengan pusat di Katobengke mencakup wilayah wilayah Kelurahan Lipu, Sula'a, Badia dan Waborobo.
4. BWK IV dikembangkan dengan fungsi sebagai pusat pemukiman kota, industri pengolahan, dan pergudangan. Sebagai pusat pelayanan adalah Kelurahan Waruruma dengan cakupan pelayanan meliputi Kelurahan Kadolokatapi, Kadolomoko, Waruruma, dan Lakologou di arah utara sampai batas sungai Bungi
5. BWK V diarahkan untuk fungsi pertanian tanaman pangan, perikanan, perdagangan hasil-hasil pertanian, dan pengembangan pusat pemukiman kota. Berpusat di Liabuku mencakup seluruh wilayah Kecamatan Bungi
6. BWK VI dikembangkan dengan fungsi utama pertanian holtikultura, perkebunan dan kehutanan, didukung kegiatan perdagangan dan pengolahan hasil-hasil

pertanian, perkebunan, dan kehutanan. BWK ini dipusatkan di Kaisabu dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh kelurahan di Kecamatan Sorawolio.

2. Kondisi Fisik Buatan

Secara garis besar penggunaan lahan di Kota BauBau dapat dibedakan atas penggunaan lahan perkotaan (urban) dan penggunaan lahan perdesaan (rural). Jenis penggunaan lahan yang dikategorikan urban, meliputi perumahan kota, industri, pergudangan, perdagangan, sosial dan fasilitas umum untuk transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan untuk lahan perdesaan meliputi sawah, tambak, kebun campuran, padang rumput, semak dan hutan. Penggunaan lahan perkotaan saat ini terfokus di kota bawah disekitar pantai, sedangkan untuk kota atas kegiatan pertanian masih mendominasi penggunaan lahannya.

Rasio luas areal terbangun Kota BauBau relatif masih rendah yaitu sebesar 1,80954 Ha atau 8,19 % dari luas wilayah kota. Secara umum kawasan terbangun didominasi oleh bangunan perumahan, fasilitas sosial, jasa, perdagangan, industri dan jaringan infrastruktur. Sedangkan kawasan yang belum terbangun mempunyai luas 20,290,46 Ha atau 91,81 % dari luas wilayah Kota BauBau. Kawasan yang belum terbangun ini didominasi oleh pemanfaatan hutan dengan luas 9,851 Ha atau 43,35 % dari total luas lahan. Pemanfaatan lahan lainnya yaitu digunakan sebagai perkebunan rakyat yaitu sebesar 14,62 % atau seluas 3,232,5 Ha, sisanya adalah ladang 8,67 %, pekarangan 8,19 %, sawah 4,41 % tegalan atau kebun, dan tanah kosong.

a. Perumahan

Perumahan merupakan bagian dari sumber daya buatan kota yang dapat merupakan faktor penghambat daya tarik kota bagi para investor dan pendatang apabila tidak tertata dengan tepat, tetapi sebaliknya pemukiman merupakan faktor pendorong proses peningkatan daya tarik kota bagi para pendatang dan investor apabila dikelola secara tepat

b. Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan berupa pasar, toko dan warung serta rumah makan merupakan wadah dalam rangka melangsungkan proses jual beli baik kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan penunjang (sekunder) penduduk.

c. Fasilitas Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta telah menunjukkan kemajuan yang positif

d. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan secara mudah, merata dan murah

e. Fasilitas Peribadatan

Secara kuantitatif, sarana peribadatan di daerah ini dari tahun ke tahun mengalami perkembangan seiring dengan penambahan pemeluk agama sebagai konsekuensi penambahan jumlah penduduk.

B. Kondisi Non Fisik

Jumlah penduduk di Kota BauBau dari Tahun 1998 s/d 2002 mengalami laju pertumbuhan yang pesat yaitu rata-rata sebesar 8.91 % per tahun. Perkembangan jumlah penduduk yang relatif tinggi di Kota BauBau telah dipengaruhi oleh faktor

migrasi di samping fertilitas. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari letak geografis wilayah Kota BauBau yang memiliki akses yang tinggi dari daerah-daerah tetangganya, disamping itu lonjakan peningkatan jumlah penduduk tersebut terjadi karena adanya arus pengungsi dari daerah konflik di Maluku dan pengungsi dari Timor-Timur yang masuk ke Kota BauBau.

Aspek kependudukan sangat erat kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan, dimana perkembangan penduduk yang tinggi akan berpengaruh terhadap besarnya angkatan kerja pada suatu daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja Kota BauBau Tahun 2000, bahwa dinamika ketenagakerjaan mengalami penurunan sebanyak 17,421 jiwa dalam kurun waktu 1998-2000. Sedangkan penduduk untuk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu mengalami penurunan sebanyak 34,027 jiwa.

Salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan ekonomi Kota BauBau dalam suatu periode tertentu adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayahnya. PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi atau sektor dalam suatu wilayah atau daerah tertentu atau dapat didefinisikan pula sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

C. Skenario Pembangunan

Pengembangan tata ruang Kota BauBau ditempuh dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama mendorong pertumbuhan kota melalui pengembangan kegiatan yang diarahkan sedemikian rupa untuk menciptakan jenjang dan skala pelayanan yang jelas serta mengedepankan pemerataan antara kecamatan dan antar bagian wilayah

kota (BWK). Pendekatan kedua ditempuh dengan menciptakan struktur ruang kota yang meluas kearah kawasan-kawasan pinggiran. Langkah ini ditempuh dengan cara mengembangkan jaringan jalan dan pengembangan fasilitas-fasilitas kota di sub pusat pelayanan di pinggiran kota. Untuk itu, dilakukan berbagai studi khusus bagi pengembangan Kawasan Industri Pariwisata dan Perikanan Terpadu (KIPPT), Studi Pengembangan Kawasan Palagimata, Studi Master Plan Pengembangan Kawasan Kota Mara, Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Penyusunan Rencana Tata Letak Bangunan Kawasan Bukit Wolio Indah dan Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok).

Penataan ruang kawasan pesisir ditujukan untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan mengingat bahwa letak Kota BauBau berhadapan langsung dengan pantai. Disamping itu, garis pantai Kota Bau Bau yang hanya $\frac{1}{2}$ 42 Km menjadikan keterbatasan ruang daerah pesisir dimaksud perlu dilakukan penataan sebaik baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat. Agar pemanfaatan ruang dalam kurun berlakunya rencana sesuai dengan yang ditetapkan dalam RDTR maka diperlukan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Arahan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
 - a. Administrasi Pemerintahan

RDTR-BB yang akan ditetapkan sebagai peraturan Daerah memberi gambaran struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan jangka waktu perencanaan 10 tahun,

dengan tingkat kedalaman setara dengan ketelitian 1 : 5.000. mengingat sifat dan skala ketelitiannya, maka pemanfaatannya terbatas terutama sebagai pedoman untuk perumusan pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan. Untuk mengisi program-program pemanfaatan ruang atau pembangunan pada kawasan-kawasan dalam bagian blok peruntukan, masih diperlukan rencana tata ruang kawasan yang lebih rinci.

Bentuk pelaporan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pengumpulan data atau informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Bentuk pemantauan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemeriksaan secara cermat perubahan tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kegiatan pemantauan ini didasarkan pada hasil pelaporan yang mencakup kegiatan pengumpulan data dan informasi (kualitatif dan kuantitatif) tentang pemanfaatan ruang yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (sektor swasta) serta perubahan-perubahan perwujudan tata ruang yang terjadi di lapangan. Data dan informasi hasil pemantauan disajikan dalam bentuk tabulasi dan sebaran geografis dan waktu ke waktu (time series) yang terkait dalam pengembangan sistem informasi penataan ruang. Pelaporan dan pemantauan pemanfaatan ruang perlu dilakukan secara berkesinambungan sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan utama dalam kegiatan evaluasi untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Dalam kaitan ini sesuai dengan kurun waktu RDTRK-BB 10 tahun (2004-2013), maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi atau peninjauan kembali terhadap RDTR sekurang-kurangnya satu

kali dalam lima tahunan, atau bisa lebih intensif apabila diperlukan. Hasil evaluasi inilah yang akan menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap RDTRK-BB.

Dalam kegiatan evaluasi dilakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan pemanfaatan ruang serta perbedaan wujud pemanfaatan ruang (fakta terhadap rencana) sehingga dapat diidentifikasi sejauhmana simpangan atau deviasi yang terjadi. Selain itu, dalam kegiatan evaluasi perlu pula dipertimbangkan berbagai faktor pengaruh eksternal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota, antara lain :

1. Dinamika perkembangan kota yang pesat
2. Peraturan atau rujukan baru yang berkaitan dengan penataan ruang yang berbeda dengan prosedur dan produk rencana tata ruang yang berlaku sekarang
3. Kebijakan baru, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, daerah maupun sektor swasta
4. Perubahan orientasi/paradigm baru dalam pembangunan kota

Untuk dapat melakukan evaluasi atau menilai sejauhmana simpangan pemanfaatan ruang terhadap rencana yang ditetapkan, perlu diperhatikan kriteria bahwa pemanfaatan ruang kota dinyatakan sesuai atau tidak terjadi simpangan apabila terpenuhi :

1. RDTR Kota BauBau telah ditetapkan sebagai peraturan daerah dan terdiseminasi ke instansi pemerintah daerah dan masyarakat luas
2. RDTR Kota BauBau benar-benar dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang sehingga RDTR merupakan

dokumen resmi dalam rapat koordinasi pembangunan daerah seperti halnya dokumen pembangunan daerah lainnya seperti Renstra, Propeda dan Repelitada

b. Penertiban Pemanfaatan Ruang

Penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Tindakan penertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh pemerintah kota melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran / penyimpangan dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuk penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah didasarkan pada bentuk pelanggaran sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang. Dalam kaitan itu bentuk penertiban yang telah diterapkan antara lain adalah penghentian kegiatan atau pembangunan dan pencabutan izin yang telah diterbitkan
2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi luasan menyimpang. Dalam kaitan ini bentuk penertiban yang dapat diterapkan adalah penghentian kegiatan dan kegiatan dibatasi pada luasan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan
3. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi persyaratan teknis menyimpang. Dalam kaitan ini bentuk penertiban yang dapat diterapkan adalah penghentian kegiatan dan memenuhi persyaratan teknis

4. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang. Dalam kaitan ini penertiban yang dapat dilakukan adalah penghentian kegiatan dan penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang

c. Pendayagunaan Mekanisme Perizinan Pemanfaatan Ruang

Secara umum pengertian perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai konfirmasi persetujuan atas pemanfaatan ruang sebagai bagian dari mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam kaitan ini maka mekanisme perizinan pemanfaatan ruang perlu didayagunakan agar secara dini dapat dipakai sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat diandalkan.

Perizinan yang terkait secara langsung dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah Izin Lokasi, Izin Perencanaan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di luar izin-izin tersebut, perizinan dan/atau pertimbangan kelayakan yang masih erat kaitannya adalah Izin Undang-Undang Gangguan (IUUG/HO) dan atau analisis mengenai dampak lingkungan yang dikenakan untuk kegiatan yang dinilai akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Sesuai dengan tingkat ketelitiannya, RDTRK-BB dapat dijadikan acuan dalam penertiban perizinan lokasi pemanfaatan ruang suatu kegiatan. Untuk mendayagunakan mekanisme perizinan ini maka setiap kegiatan yang dimohonkan izin lokasinya perlu memperoleh konfirmasi kesesuaiannya dengan RDTRK-BB, sehingga jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan atau lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan dalam fungsi yang ditetapkan RDTRK-BB. Atas dasar izin lokasi yang telah sesuai dengan RDTRK-BB.

kegiatan dapat dikembangkan dengan memenuhi persyaratan dan mekanisme perizinan lainnya.

Di samping itu, kebijaksanaan disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Kebijakan ini dilaksanakan melalui penolakan pemberian perizinan pemanfaatan ruang atau perizinan pembangunan, serta pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.

2. Strategi Pembangunan

Pembangunan kota yang sangat dinamis dan dilakukan oleh berbagai pihak dalam berbagai sektor, dan dalam kurun waktu yang tidak singkat, memerlukan suatu strategis yang tepat. Pembangunan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas adalah sangat tepat dalam pengembangan kota. Skala prioritas pembangunan kota ditentukan berdasarkan asas berikut :

- a. Mendorong pemerataan dan perluasan manfaat pembangunan sosial ekonomi bagi seluruh golongan dan lapisan masyarakat. Dalam hal ini pembangunan prasarana dan sarana kota disebarkan ke seluruh pusat-pusat kegiatan kota.
- b. Mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan terpadu serta mencakup berbagai aspek perkotaan. Dalam segala sektor dan tempat, pembangunan setiap BWK dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
- c. Pengarahan pembangunan fisik kota ke suatu lokasi agar pemanfaatan ruang kota menjadi efisien sehingga pergerakan penduduk dan pelayan pemerintah terhadap

masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pada daerah-daerah perbukitan tertentu dilakukan pematangan lahan dengan pendekatan teknologi terasering

- d. Melestarikan warisan budaya dan sejarah. Dalam hal ini pembangunan prasarana dan sarana kota agar memperhatikan dan melindungi peninggalan budaya dan sejarah yang bernilai tinggi
- e. Mendorong terciptanya lingkungan perkotaan yang sehat. Dalam hal ini disusun rencana pengendalian perkembangan fisik kota yang potensial mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan hidup kota seperti terganggunya fungsi lindung hutan, pantai, sumber air dan sungai. Pengendalian pembangunan perumahan yang sporadik, tidak teratur dan pemanfaatan lahan yang tidak optimal

Kebijakan penataan kota sebagai upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu keberpihakan Pemerintah Kota BauBau dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan. Kota BauBau sebagai pusat pelayanan internal yang melayani seluruh aktifitas penduduk kota, juga memiliki fungsi dan peran sebagai pusat pelayanan eksternal dalam sistem kota-kota daerah *hinterlandnya*. Kota BauBau termasuk dalam WP-III yang meliputi wilayah pulau Buton bagian selatan, pulau Muna bagian selatan, pulau Kabaena, dan Kepulauan Tukang Besi. Pengembangan WP ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan perikanan, perkebunan, pertambangan dan kegiatan agro industri. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu letak geografis Kota BauBau sebagai simpul distribusi dan akumulasi kegiatan. Di samping itu, potensi Kota BauBau sebagai simpul distribusi dan akumulasi kegiatan. Disamping itu, potensi Kota BauBau dapat menjadi *pull over* bagi wilayah sekitarnya.

Pemberdayaan Masyarakat menurut Khrisna (2003) didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas perseorangan atau kelompok untuk mempengaruhi pengembangan (development) dan pilihan hidup dan mentransformasikan pilihan tersebut kedalam tindakan yang diinginkan dan kedalam hasil bagi pengembangan komunitas mereka. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah proses yang bergerak dari bawah ke atas (bottom- up) dari perubahan hubungan antar masyarakat dan lembaga eksternal, sehingga kelompok yang kurang beruntung bisa lebih berdaya atau mempunyai kendali terhadap kehidupaan mereka sendiri. Pada akhirnya, kelompok masyarakat sendiri bisa mempraktekan kehidupan sistem dengan cara bekerja bersama, berhubungan dengan lembaga eksternal, dan terus menjaga penggunaan sumber—sumber daya mereka.

Dalam menemukenali proses pemberdayaan masyarakat tersebut, terdapat sebuah kerangka terdapat sebuah kerangka dari Schevyens (1999) yang dikembangkan dari pemikiran Friedmenn (1992) dalam konteks pengkajian pemberdayaan masyarakat lokal dalam perusahaan ekowisata. Mengacu pada pendapat Schevyens tersebut, pemberdayaan dapat dilihat 4 tingkatan, yaitu : 1. Pemberdayaan Ekonomi; 2. Pemberdayaan Psikologis; 3. pemberdayaan sosial dan 4. pemberdayaan politik

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi disini adalah sejauh mana pengembangan yang dilaksanakan dapat membawa keuntungan secara ekonomi kepada masyarakat lokal. Masyarakat dikatakan berdaya apabila uang yang dihasilkan atau beredar dibagi diantara banyak rumah tangga dalam masyarakat. Melalui kepemilikan secara ekonomi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan peningkatan hidupnya, seperti membangun rumah yang lebih layak dan sistem air yang lebih baik.

2. Pemberdayaan Psikologis

Pemberdayaan Psikologis berarti masyarakat lokal memiliki rasa optimis dalam melihat masa depan mereka, mandiri dan bangga akan tradisi mereka, masyarakat dapat dikatakan berdaya secara psikologis apabila rasa percaya diri dari banyak anggota masyarakat meningkat karena adanya pengakuan dari pihak luar terhadap keunikan nilai nilai budaya, sumber daya alam dan pengetahuan mereka.

3. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial berarti tercipta sebuah situasi dimana nilai kohesi dan integritas masyarakat diperkuat melalui pembangunan yang dijalankan. Masyarakat dikatakan berdaya sosial bila kohesi masyarakat dapat meningkat dimana individu dan keluarga dapat bekerja sama dalam menyukseskan pembangunan.

4. Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan politik berarti suara masyarakat dan kepentingan mereka turut mengarahkan dalam penyelenggaraan pembangunan mulai dari tahapan awal (perencanaan) sampai tahapan implementasi. Masyarakat dikatakan berdaya secara politik apabila struktur masyarakat yang mempresentasikan kebutuhan dan

kepentingan kelompok masyarakat menyediakan sebuah forum dimana masyarakat dapat menyuarkan aspirasi mereka dalam penyelenggaraan pembangunan.

3. Konsep Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

A. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Ramli (1992) bahwa sektor informal selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan juga keberadaan kemampuan sektor informal ini bertahan di perkotaan tanpa bantuan dari pemerintah adalah karena adanya kebutuhan akan berbagai macam produk dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal ini.

Beberapa ahli beranggapan bahwa sektor formal pun membutuhkan keberadaan sektor informal, sehingga tepat sekali bila dikatakan bahwa sektor formal dan informal dianggap berkaitan dan saling melengkapi dalam kegiatan perekonomian perkotaan. Salah satu bentuk perdagangan sektor informal yang begitu penting adalah pedagang kaki lima.

ILO dalam Sudarsono (1982) memberikan definisi tentang sektor informal sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya dan teknologi yang disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan, tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar penuh persaingan.

Rachbini dan Hamid (1994) menjelaskan bahwa sektor informal berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa terutama bagi masyarakat golongan ekonomi

menengah ke bawah yang tinggal di kota-kota. Pelaku sektor ini pada umumnya berasal dari desa-desa dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah serta sumber-sumber terbatas.

Hutajulu (1985) menjelaskan bahwa batasan tentang sektor informal, adalah suatu bidang kegiatan ekonomi yang untuk memasukinya tidak selalu memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, dan memerlukan surat-surat izin serta modal yang besar untuk memproduksi barang dan jasa.

Sethurahman (1985) memberi batasan sektor informal ini sebagai unit-unit usaha berskala kecil yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan dari pada memperoleh keuntungan.

Dalam Hidayat (1987) bahwa sebelumnya telah disepakati secara bersama-sama tentang sebelas ciri pokok sektor informal yakni sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak ada
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor
6. Teknologi yang digunakan bersifat primitif
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil

8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja
9. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man enterprise* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga
10. Sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi.
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa-kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah

Selanjutnya Pedagang Kaki Lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Winardi dalam Haryono, 1989).

Lebih lanjut menurut Breman (1988) Pedagang Kaki Lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

Pedagang Kaki Lima pada umumnya adalah *Self- Employed*, artinya mayoritas Pedagang Kaki Lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja.

Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, biasanya berasal dari sumber dana ilegal dan dari suplayer yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang besar dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan karena rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil (Hidayat, 1978)

Definisi menurut International Labour Organization (ILO), pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, keterampilan yang dibutuhkan diperoleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan penuh (Hadji Ali, 1985)

Selanjutnya Wirosardjono (1985) menjelaskan pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor marginal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya
2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan liar
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian
4. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu
5. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha yang lain

6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah
7. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja
8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama
9. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya

Berdasarkan barang atau jasa yang diperdagangkan, menurut Karafi dalam Umboh (1990) Pedagang Kaki Lima dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Pedagang minuman; 2. Pedagang makanan; 3. Pedagang buah-buahan; 4. Pedagang sayur-sayuran; 5. Pedagang daging dan ikan; 6. Pedagang rokok dan obat-obatan; 7. Pedagang buku, majalah dan surat kabar; 8. Pedagang tekstil dan pakaian; 9. Pedagang kelontong; 10. Pedagang loak; 11. Pedagang onderdil kendaraan, bensin dan minyak tanah; 12. Pedagang ayam, kambing, burung dan 13. Pedagang beras serta; 14. Penjual jasa.

B. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam teori deontologi, yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Relokasi PKL merupakan salah satu upaya menata tata ruang wilayah kota sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, ada aturan-aturan yang mengikat tentang tata ruang, seperti UU Tata Ruang dan perda-perda yang berlaku di setiap daerah. Inilah yang seringkali memicu terjadinya kekerasan dan

kericuhan dalam relokasi Pedagang Kaki Lima yang berdasarkan suatu kewajiban terkait aturan-aturan tertentu.

Dalam teori hak, hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Merelokasi Pedagang Kaki Lima dari trotoar-trotoar dalam satu sisi merupakan upaya untuk memperoleh hak pejalan kaki untuk dapat berjalan di trotoar dengan nyaman. Namun, di sisi lain para Pedagang Kaki Lima juga memiliki hak untuk berjualan demi memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, dalam teori hak ini setiap pihak selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya tujuan lain.

Dalam teori keutamaan, adalah teori yang memandang sikap atau ahklak seseorang. Keutamaan bisa didefinisikan disposisi watak yang diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Teori keutamaan memungkinkan untuk mengembangkan penilaian etis yang lebih positif. Relokasi Pedagang Kaki Lima akan menjadi suatu upaya yang positif ketika aspek etis dan moral lebih dikedepankan.

Relokasi Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penataan ruang terpadu dapat dikatakan sebagai upaya memberdayakan masyarakat yang bermakna sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable* (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996)

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (1999) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan atau pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan.

Relokasi yang dilakukan oleh pemerintah sejauh memperhatikan kepentingan pedagang kaki lima ini tentu membawa manfaat yang baik antara kedua belah pihak baik pemerintah maupun dari pedagang kaki lima itu sendiri.

Selanjutnya Richardson (1991) berpendapat bahwa keputusan-keputusan penentuan lokasi yang memaksimalkan penerimaan biasanya diambil bila memenuhi kriteria-kriteria pokok :

1. Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak.
2. Tempat yang luas lingkungannya untuk kemungkinan perluasan unit produksi.

B. Kerangka Berpikir

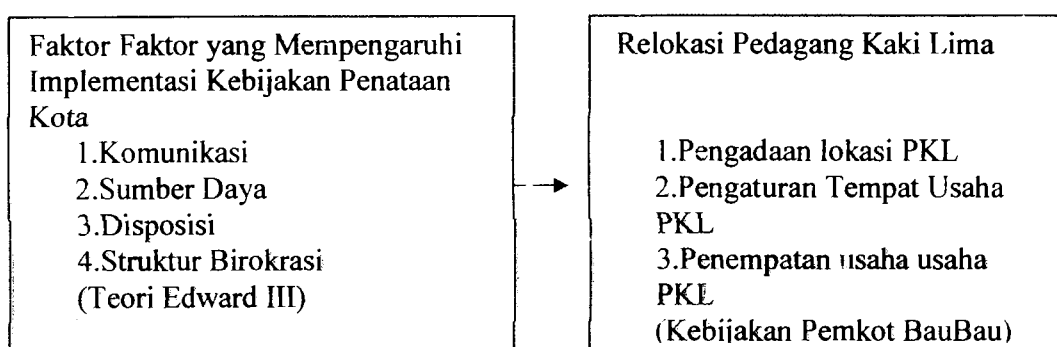
Konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Edward III dalam (Abdullah 1988:400) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang merupakan syarat syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Empat Faktor itu antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Untuk konsep relokasi pedagang kaki lima dengan mengacu pada Perda Nomor 12 tahun 2000 tentang pengaturan usaha pedagang kaki lima (PKL) khususnya pasal 3 yang berbunyi bahwa:

1. Pengadaan, pemindahan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota
2. Lokasi dan dan pengaturan tempat tempat PKL sebagaimana dimaksud ayat 1 ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota
3. Penunjukan dan penempatan usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat 2 milik dan akan dikuasai oleh pemerintah atau pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



C. Definisi Konseptual

1. Implikasi Implementasi kebijakan penataan kota adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah kota BauBau untuk menata kotanya yang meliputi enam BWK, mendorong pertumbuhan kota, menciptakan struktur kota, menciptakan suasana komunikasi yang harmonis dan meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM
2. Relokasi Pedagang Kaki Lima, adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota BauBau dalam upaya keberadaan pedagang kaki lima, mengatur tempat usaha pedagang kaki lima, penunjukan dan penetapan usaha usaha Pedagang Kaki Lima.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB. III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian “ Implikasi Kebijakan Penataan Kota Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau” adalah sebagai berikut :

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil unit analisis Pemerintah Kota BauBau. Menurut Heryawan Wasito (1992 : 6) penelitian kualitatif dasarnya dicirikan sebagai berikut : Pertama, suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Kedua, penelitian dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip (fact or principles) dengan sabar, hati-hati serta sistematis. Ketiga, usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Moleong (2000 : 27) berpendapat bahwa penelitian sosial yang digunakan di lapangan adalah metode kualitatif dengan alasan pertama, lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua; metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti dengan responden, ketiga; lebih peka dan dapat lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Subyek Penelitian

Objek penelitian adalah program relokasi yang diadakan oleh Pemerintah Kota BauBau terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang bertempat di kawasan Pantai Kamali BauBau dan lokasi tempat jajanan makanan Pujaserata Stadion Kota BauBau serta pedagang buah pusat Lapangan Lembah Hijau yang seluruhnya terletak pada BWK I dan BWK II

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa wawancara dengan pedoman wawancara, dan wawancara dilakukan pada aparat pemerintah yaitu Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota BauBau (1 orang) selaku penanggung jawab program penataan kota tingkat BauBau, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau (1 orang) masyarakat pedagang kaki lima masing-masing (3 orang) untuk lokasi Pantai Kamali, Pujaserata dan Pedagang Buah Pusat Lembah Hijau.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data diantaranya adalah studi, dokumentasi dan wawancara yang terstruktur dan jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti, cara ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan dari literatur, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah.

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data atau analisis data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara triangulasi data (pengecekan keabsahan data) dan analisis isi (Content Analysis), jika dengan acara triangulasi kredibilitas data masih menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut sehingga data dianggap benar, kebenaran dan kecocokannya selama penarikan kesimpulan. Sementara, analisis isi (Content Analysis) digunakan pada sebagian penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi, maka setiap komunikasi selalu berisi pesan dan sinyal komunikasi, baik berupa verbal maupun nonverbal, sehingga makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap komunikasi

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota BauBau

1. 1. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah

a. Letak Geografis

Daerah Kota BauBau adalah salah satu daerah yang ada di jazirah Sulawesi Tenggara. Dilihat dari letaknya, Kota BauBau tepatnya berada dibagian selatan pulau Buton dan secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa diantara $5,21^{\circ}$ - $5,30^{\circ}$ Lintang Selatan dan diantara $122,30^{\circ}$ - $122,47^{\circ}$ Bujur Timur

b. Luas Wilayah

Kota BauBau merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Buton yang awalnya terdiri dari 4 (empat) Kecamatan. Namun semenjak tahun 2006 kota BauBau telah menjadi 6 Kecamatan dengan luas wilayah $221,00 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari Kecamatan Betoambari $27,89 \text{ Km}^2$, Kecamatan Murhum $5,45 \text{ Km}^2$ (pecahan dari Kecamatan Betoambari), kecamatan Wolio $17,33 \text{ Km}^2$, Kecamatan Kokalukuna $9,44 \text{ Km}^2$ (pecahan dari kecamatan Wolio), Kecamatan Sorawolio $83,25 \text{ Km}^2$ dan Kecamatan Bungi seluas $76,64 \text{ Km}^2$

c. Batas Wilayah

Kota BauBau berbatasan pada sebelah utara dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan sebelah barat dengan Selat Buton.

Gambaran batas wilayah Kota BauBau menurut daerah seperti pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kota BauBau

No	Daerah	Batas Wilayah			
		Sebelah Utara	Sebelah Selatan	Sebelah Timur	Sebelah Barat
1	2	3	4	5	6
1	Kota Bau Bau	Kec. Kapontori	Kecamatan Batauga	Kecamatan Pasarwajo	Selat Buton
2	Kec. Betoambari	Selat Buton	Kecamatan Batauga	Kecamatan Murhum	Selat Buton
3	Kec. Murhum	Selat Buton	Kecamatan Betoambari	Kecamatan Wolio	Selat Buton
4	Kec. Wolio	Selat Buton	Kecamatan Sorawolio	Kecamatan Kokalukuna	Kec. Murhum
5	Kec. Kokalukuna	Kec. Bungi	Kecamatan Wolio	Kecamatan Sorawolio	Selat Buton
6	Kec. Sorawolio	Kec. Bungi	Kecamatan Sampolawa	Kecamatan Pasarwajo	Kec. Wolio
7	Kec. Bungi	Selat Buton	Kecamatan Sorawolio	Kecamatan Kapontori	Selat Buton

Sumber : Kota BauBau Dalam Angka Tahun 2007/2008

1.2. Topografi dan Hidrologi

a. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kota BauBau pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit. Diantaranya gunung dan berbukit-bukit terbentang dataran yang merupakan daerah-daerah potensial untuk mengembangkan sektor pertanian.

b. Hidrologi

Kota BauBau memiliki sungai yang besar yaitu sungai BauBau yang membatasi Kecamatan Wolio dan Kecamatan Murhum dan membelah Kota BauBau. Sungai tersebut umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah tangga

c. Keadaan Iklim Daerah Kota BauBau

Keadaan iklim di daerah Kota BauBau umumnya sama dengan daerah lain disekitarnya, yang mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

1.3. Keadaan Demografis

a. Jumlah penduduk

Penduduk wilayah Kota BauBau menurut hasil sensus penduduk (SP) tahun 1990 berjumlah 77.224 jiwa dan sepuluh tahun kemudian tepatnya pada sensus tahun 2000 telah bertambah hingga mencapai 106.092 jiwa. Jumlah ini diambil dari hasil sensus penduduk di kecamatan-kecamatan bentukan Kota BauBau. Data 2007 proyeksi penduduk yang dilakukan BPS berasal dari survey penduduk antar Sensus 2005 (SUPAC 05) penduduk Kota BauBau sebanyak 124.609 jiwa. Untuk data selengkapnya jumlah penduduk yang dirinci menurut kecamatan dari tahun 2001 sampai tahun 2007 disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2

Penduduk Kota BauBau menurut Kecamatan Tahun 2001-2007

Tahun	Beto- Ambari	Murhum	Wolio	Kokalu Kuna	Sora wolio	Bungi	Jumlah total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2001	50,064	-	41,480	-	5,719		107975
2002	49,913	-	41,570	-	5,865		109548
2003	53,482	-	45,475	-	6,161	11,783	116901
2004	54,886	-	46,794	-	6,404	12,418	120502
2005	55,195	-	47,057	-	6,440	12,488	121180
2006	13,648	42,075	32,406	15,101	6,502	12,607	122339
2007	13,901	42830	33,023	15,378	6,624	12,848	124609

Sumber : Kota BauBau dalam angka Tahun 2008, data 2001-2005 belum pemekaran

b. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota BauBau pada tahun 1990 sebanyak 77,224 dan pada tahun 2000 sebanyak 106,92 jiwa, sehingga rata-rata laju pertumbuhan pertahun selama kurun waktu 10 tahun sebesar 3,23 % dan kurun waktu tahun 2006 sebesar 1,86 % yaitu dari 122,339 jiwa menjadi 124,609 jiwa ditahun 2007

Dari enam kecamatan yang ada di Kota BauBau, pertumbuhan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Wolio dengan pertumbuhan sebesar 1,92 %, disusul kecamatan Bungi 1,91 %. Sedang pertumbuhan terkecil adalah terdapat di Kecamatan Murhum sebesar 1,79 %. Selengkapnya jumlah penduduk dan rata-rata laju

pertumbuhan penduduk Kota BauBau menurut kecamatan akan digambarkan pada

Tabel 4.3

Tabel 4.3
Jumlah dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Kota BauBau Menurut
Kecamatan Tahun 1990,2000, 2007

Kecamatan	Penduduk				Laju pertumbuhan (%)	
	1990	2000	2006	2007	1990-2000	2006-2007
1	2	3	4	5	6	7
Betoambari	33 722	49 039	13 648	13 901	3,82	1,85
Murhum	-	-	42 075	42 830	-	1,79
Wolio	30 766	40 985	32 406	33 028	2,91	1,92
Kokalukuna	-	-	15 101	15 378	-	1,83
Sorawolio	4366	5618	6502	6624	2,55	1,88
Bungi	8370	10 450	12 607	12848	2,24	1,91
Kota Bau Bau	77,224	106 092	122339	124609	3,23	1,86

Sumber : Kota BauBau dalam Angka Tahun 2008

c. Kepadatan Penduduk

Luas wilayah kota BauBau adalah 221,00 Km². Kepadatan Kota BauBau tahun 1990 sebesar 480 jiwa per Km² dan selanjutnya pada tahun 2007 meningkat menjadi 564 jiwa per Km². Selengkapnya kepadatan penduduk Kota BauBau akan kami tampilkan pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Kepadatan Penduduk Kota BauBau menurut Kecamatan
Tahun 1990, 2000, 2007

Kecamatan	Luas Area (Km2)	Penduduk			Kepadatan Perpendudukan per Km2		
		1	4	5	6	7	8
Betoambari	27,89	33 722	49 039	13 901	928	1428	498
Murhum	6,45	-	-	42 830	-	-	6640
Wolio	7,33	30 776	40 985	33028	1149	1531	1906
Kokalukuna	9,44	-	-	15378	-	-	1629
Sorawoli	83,26	4336	5618	6624	52	67	80
Bungi	76,64	8370	10450	12848	109	136	168
Jumlah	221,00	77 224	106092	124609	349	480	564

Sumber : Kota BauBau dalam Angka Tahun 2008

(-) : Data tidak diperoleh karena belum pemekaran

d. Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kota BauBau tahun 2007 tercatat sebanyak 124.609 jiwa yang penyebarannya adalah 42.830 jiwa (34,37 %) di Kecamatan Murhum, 33.028 jiwa (26,51 persen) di Kecamatan Wolio, 15.378 jiwa (12,34 persen) di Kecamatan Kokalukuna, 13.901 jiwa (11,16 persen) di Kecamatan Sorawolio. Selengkapnya

persebaran penduduk Kota BauBau menurut kecamatan akan ditampilkan pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Persebaran Penduduk Kota BauBau menurut Kecamatan
Tahun 1990, 2000, 2007

Kecamatan	1990		2000		2007	
	Pen- duduk	% Per Sebaran	Pendu Duk	%Per sebaran	Pendu duk	%Per Sebaran
1	2	3	4	5	6	7
Betoambari	33 722	43,67	49 039	46,22	13 901	11,16
Murhum	-	-	-	-	42 830	34,37
Wolio	30 766	39,84	40 985	38,63	33 028	26,51
Kokalukuna	-	-	-	-	15 378	12,34
Sorawolio	4 366	5,65	5618	5,30	6 624	5,32
Bungi	8 370	10,84	10 450	9,85	12 848	10,31
Kota Bau Bau	77 224	100,00	106 092	100,00	124 609	100,00

Sumber : Kota BauBau Dalam angka Tahun 2008

(-) : Data tidak diperoleh karena belum pemekaran Tahun 1990-2000

e. Umur Penduduk

Umur penduduk Kota BauBau menunjukkan bahwa pada tahun 2007 adalah 59,39 persen atau sebanyak 74.008 jiwa yang termaksud usia produktif dan penduduk non produktif adalah 40,61 persen atau sebanyak 50.601 jiwa. Selanjutnya menurut jenis kelamin, jumlah penduduk tahun 2007 sebanyak 61.395 jiwa atau 49,27 persen adalah laki-laki dan sebanyak 63.214 jiwa atau 50,73 persen adalah perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau rasio jenis kelamin

penduduk tahun 2007 sebesar 97,12 yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 97 orang penduduk laki-laki. Selengkapnya penduduk di Kota Bau Bau menurut kelompok umur dan jenis kelamin akan kami tampilkan pada tabel 4.6

Tabel 4.6
Penduduk Kota BauBau menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin
Tahun 2006-2007

Kelompok Umur	Laki- Laki		Perempuan		Jumlah	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
0-14	7212	7733	7686	7440	14 898	15 203
10-14	7316	7 877	7907	7653	15223	15 530
20-24	5590	6 017	6980	6756	12570	12 773
35-39	3201	3446	3774	3653	6957	7099
50-54	1746	1881	2054	1988	3800	3869
60-64	1086	1170	1328	1285	2414	2455
75 +	380	409	527	509	907	918
Jumlah	57 027	61 395	65 312	63214	122 339	124 609

Sumber : Kota BauBau dalam angka Tahun 2008

f. Keadaan Sosial

Kota BauBau telah melakukan berbagai usaha guna terciptanya kesejahteraan masyarakat dibidang sosial yang lebih baik. Usaha tersebut meliputi kegiatan dibidang pendidikan, agama, kesehatan, ketertiban dan keamanan masyarakat serta sosial lainnya.

1. Pendidikan

Sebagaimana diamanatkan oleh GBHN bahwa sasaran pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan yaitu mulai dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk mencapai sumber daya manusia yang seutuhnya.

2. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pembangunan bidang kesehatan di Kota BauBau diarahkan pada peningkatan tingkat kesehatan dengan memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat tersebut akan ditingkatkan melalui pemberantasan berbagai macam penyakit, perbaikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Demikian pula tujuan pembangunan Program Nasional Keluarga Berencana adalah terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga demi terciptanya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (PNKKBS).

Untuk mencapai sasaran pembangunan diatas, baik dibidang kesehatan maupun dibidang Keluarga Berencana di Kota Bau Bau telah digiatkan pembangunan sarana dan prasarana serta pelayanan Keluarga Berencana

1.4. Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan berupa pasar, toko dan warung serta rumah makan merupakan wadah dalam rangka melangsungkan proses jual beli baik kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan penunjang (sekunder) penduduk, dengan pola

sebaran yang hampir mencakup seluruh wilayah desa atau kelurahan, khusus untuk jenis fasilitas perdagangan skala pelayanan lingkungan yaitu warung atau kios sudah mencakup seluruh wilayah desa dan kelurahan di wilayah Kota BauBau.

Keberadaan berbagai jenis fasilitas perdagangan dengan berbagai jenis dan tingkatan ini sudah cukup menunjang kegiatan perdagangan maupun kelancaran aktivitas perekonomian dalam rangka pemenuhan barang-barang kebutuhan sehari-hari, bahan bangunan, logam dan sebagainya di wilayah Kota BauBau. Bahkan dengan pola sebaran demikian merata hampir ke seluruh wilayah bahkan sampai ke pelosok sesuai dengan tingkatannya, cukup memudahkan jangkauan pelayanan terhadap tiap unit lingkungan maupun terhadap unit lingkungan terdekat. Namun pemusatan aktivitas perdagangan dan jasa di Kelurahan Wale dan Kelurahan Tomba. Untuk fasilitas perdagangan skala kota dan regional hanya terdapat pusat Kota BauBau (Kecamatan Wolio dan Betoambari), yaitu sebanyak 4 unit pasar umum modern dan 4 unit pusat perbelanjaan (swalayan). Fasilitas perdagangan lainnya yang menunjang kegiatan perdagangan maupun perekonomian di wilayah Kota BauBau yaitu rumah makan yang seluruhnya berjumlah 84 unit.

Dari seluruh jenis dan tingkatan fasilitas perdagangan ini sebaran terbanyak terdapat di Kecamatan Betoambari yaitu sebanyak 1.179 unit dan Kecamatan Wolio yaitu sebanyak 1.157 unit sedangkan sebaran terendah adalah Kecamatan Sorawolio sebanyak 52 unit. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kedua kecamatan ini merupakan wilayah inti Kota BauBau yang merupakan pusat aktivitas jasa dan perdagangan utama sehingga sebagian besar fasilitas yang ada terkonsentrasi di kedua wilayah tersebut. Jasa pelayanan sosial ekonomi lainnya yang di Kota BauBau meliputi bank

dan koperasi. Pada Tahun 2001 terdapat jenis lembaga keuangan yang seluruhnya berjumlah 131 unit, meliputi bank sebanyak 4 unit, koperasi sebanyak 121 unit dan non bank 6 unit. Untuk fasilitas perekonomian jenis ini sebagian besar tersebar di wilayah inti kota (Kecamatan Wolio dan Betoambari). Untuk lembaga keuangan jenis bank seluruhnya terdapat di Kecamatan Wolio, sementara lembaga nonbank hanya terdapat di kecamatan Wolio sebanyak 5 unit dan Betoambari sebanyak 1 unit. Untuk lembaga koperasi tersebar di seluruh kecamatan, dimana jumlah sebaran terbanyak terdapat di Kecamatan Betoambari yaitu sebanyak 60 unit sedangkan sebaran terendah adalah Kecamatan Sorawolio yaitu 2 unit.

Jika melihat jumlah dan jenis serta penyebaran fasilitas ekonomi yang terdapat di wilayah Kota BauBau secara umum dapat dikatakan sudah memadai dan telah melayani kebutuhan penduduknya sesuai dengan tingkatan pelayanan lingkungan dan kebutuhan penggunanya, baik untuk kegiatan perdagangan, lembaga keuangan bank, koperasi maupun non bank. Kendala yang dihadapi sekarang ini adalah terkonsentrasinya fasilitas perdagangan tersebut di pusat kota sehingga cenderung berdampak pada kepadatan bangunan, lalu lintas pergerakan dan kesemrawutan aktivitas kota, terutama untuk fasilitas pertokoan, PKL (Pedagang Kaki Lima) dan pasar regional.

Aktivitas penyaluran kredit dari lembaga keuangan baik bank, koperasi, maupun lembaga non bank atau badan hukum lain, untuk kondisi sekarang sudah cukup memberikan andil dan kontribusi dalam mendorong peningkatan kegiatan investasi dan perputaran roda ekonomi di wilayah Kota BauBau. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penerima bantuan maupun jumlah nilai kredit yang disalurkan

mengingat pentingnya peran dari lembaga-lembaga keuangan tersebut dalam mendorong kemajuan ekonomi di wilayah Kota BauBau, maka pola penyaluran kredit agar lebih dipantau dan diawasi, baik dalam penyaluran maupun pengelolaannya. Selain itu lembaga-lembaga penyalur juga perlu melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha dari para penerima kredit sehingga investasi yang ditanamkan dapat lebih bermanfaat. Lokasi fasilitas perkantoran saat ini tersebar pada kota lama (Kecamatan Betoambari dan Kecamatan Wolio) dan untuk pengembangan saat ini dan masa mendatang, fasilitas tersebut akan diarahkan ke Kota Baru.

Sektor perdagangan yang ada di Kota BauBau dapat dikategorikan berdasarkan skala pelayanannya, yang terdiri atas kegiatan perdagangan berskala lokal, regional dan nasional. Jenis barang yang diperdagangkan dalam skala lokal mencakup kebutuhan barang primer, sekunder, dan tersier atau campuran termasuk perdagangan jasa sekunder dan tersier. Barang yang diperdagangkan dalam skala regional atau nasional bervariasi mulai dari hasil tangkapan ikan laut, perkebunan dan lainnya. Untuk perdagangan skala regional dan nasional, Kota Bau-Bau berhubungan dengan Makassar, Surabaya, dan Jakarta, serta wilayah wilayah lainnya.

Aktivitas perdagangan lokal di wilayah Kota BauBau sampai dengan Tahun 2002 sudah mencakup seluruh jenis dengan tingkat persebaran yang relatif proporsional dengan pola sebaran yang hampir mencakup seluruh wilayah desa atau kelurahan. Jenis fasilitas perdagangan skala pelayanan lingkungan yaitu warung atau kios sudah mencakup seluruh wilayah desa atau kelurahan di wilayah Kota BauBau. Untuk fasilitas perdagangan skala kota dan regional hanya terdapat Kecamatan Wolio dan

Betoambari (Pusat Kota BauBau), yaitu sebanyak 4 unit pasar umum dan 3 unit pusat perbelanjaan (swalayan).

Fasilitas perdagangan lainnya yang menunjang kegiatan perdagangan maupun perekonomian di wilayah Kota BauBau yaitu rumah makan. Keberadaan berbagai jenis fasilitas perdagangan dengan berbagai jenis dan tingkatan ini sudah cukup menunjang kegiatan perdagangan maupun kelancaran aktivitas perekonomian dalam rangka pemenuhan barang-barang kebutuhan sehari-hari, bahan bangunan, logam dan sebagainya di wilayah Kota BauBau. Pola sebaran berbagai jenis fasilitas perdagangan tersebar merata hampir ke seluruh wilayah bahkan sampai ke pelosok sesuai dengan tingkatannya, sehingga cukup memudahkan jangkauan pelayanan terhadap tiap unit lingkungan maupun terhadap unit lingkungan terdekat.

Dari seluruh jenis dan tingkatan fasilitas perdagangan ini sebaran terbanyak terdapat di Kecamatan Betoambari yaitu sebanyak 1.179 unit dan Kecamatan Wolio yaitu sebanyak 1.157 unit sedangkan sebaran terendah adalah Kecamatan Sorawolio sebanyak 52 unit. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kedua kecamatan ini merupakan wilayah inti kota BauBau yang merupakan pusat aktivitas jasa dan perdagangan utama sehingga sebagian besar fasilitas yang ada terkonsentrasi di kedua wilayah tersebut.

B. Kebijakan Penataan dan Pengembangan Kota Sebagai Wujud Visi dan Misi Pemerintah Kota BauBau

Kota BauBau sebagai pusat pelayanan internal yang melayani seluruh aktifitas penduduk kota, juga memiliki fungsi dan peran sebagai pusat pelayanan eksternal dalam sistem kota-kota daerah *hinterlandnya*. Kota BauBau termasuk dalam WP-III yang meliputi wilayah pulau Buton Bagian Selatan, Pulau Muna Bagian Selatan, pulau

Kabaena, dan Kepulauan Tukang Besi. Pengembangan WP ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan perikanan, perkebunan, pertambangan dan kegiatan agro industri. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu letak geografis Kota BauBau sebagai simpul distribusi dan akumulasi kegiatan. Di samping itu, potensi Kota Bau Bau sebagai simpul distribusi dan akumulasi kegiatan. Disamping itu, potensi Kota BauBau dapat menjadi *pull over* bagi wilayah sekitarnya.

Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya koordinasi dan integrasi antar pemerintah kota / kabupaten yang terlibat dalam pembangunan antarwilayah dalam mempersiapkan penataan ruang perkotaan yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif Kota BauBau

Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, Kota BauBau memiliki visi yang merupakan gambaran umum mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Kebijakan pembangunan Kota BauBau telah tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Kota BauBau Tahun 2003-2007. Dalam kebijakan pembangunan tersebut, visi jangka panjang Kota BauBau disepakati sebagai berikut :
“Terwujudnya Kota BauBau sebagai kota perdagangan dan pelayanan jasa yang nyaman, sejahtera dan berbudaya pada tahun 2023”.

Untuk mewujudkan harapan seperti yang dimaksud dalam visi jangka panjang tersebut, maka disepakati visi jangka menengah (5 tahunan) sebagai gambaran mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Adapun visi jangka menengah tersebut adalah
“Terwujudnya Kota BauBau sebagai pintu gerbang ekonomi dan pariwisata di Sulawesi Tenggara dengan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana kota yang

memadai serta adanya kehidupan masyarakat modern dengan tetap berlandaskan pada adat, agama dan budaya lokal”.

Visi tersebut terkandung makna dan harapan yang hendak dicapai di masa depan oleh segenap masyarakat Kota BauBau, dalam mewujudkan fungsi Kota BauBau sebagai pintu gerbang ekonomi dan pariwisata di Sulawesi Tenggara dengan didukung oleh tersedianya prasarana dan sarana kota yang memadai serta adanya kehidupan masyarakat modern dengan tetap berlandaskan pada adat dan budaya lokal berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat dengan memanfaatkan potensi keunggulan lokal atau daerah.

Untuk mewujudkan visi Kota BauBau ditetapkan dan dijabarkan langkah-langkah yang lebih konkrit. Adapun misi yang harus diemban meliputi : peningkatan sarana dan prasarana kota serta pengembangan kota berbasis kota pantai, peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelayanan publik, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, pengembangan sosial budaya dan pariwisata, penegakan supremasi hukum, politik, HAM, tata pemerintahan yang baik. Adapun penjabaran masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan prasarana dan sarana kota serta pengembangan kota berbasis kota pantai
2. Peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat

Mendorong terciptanya Kota BauBau sebagai kota perdagangan dan pelayanan jasa yang kompetitif serta berdaya saing tinggi guna terciptanya iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar, melalui pemberdayaan masyarakat,

penguatan lembaga ekonomi masyarakat, perluasan lapangan kerja dan ketersediaan tenaga profesional serta menjalin kerjasama antar wilayah dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan

3. Peningkatan Kualitas SDM

Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global

4. Peningkatan Pelayanan Publik

Mengembangkan sistem pelayanan yang efektif, efisien, transparan, terjangkau, adil serta memberikan rasa aman kepada masyarakat

5. Peningkatan Pengelola Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Mendorong terciptanya suasana kota berwawasan lingkungan yang indah, bersih, nyaman melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan

6. Pengembangan Sosial Budaya dan Pariwisata

Mendorong Kota BauBau sebagai kota yang unggul dalam pengembangan budaya dan seni serta pemenuhan sarana dan fasilitas pengembangan pariwisata regional guna terciptanya kehidupan sosial kemasyarakatan yang humanis, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan adat istiadat, melalui pemberdayaan lembaga-lembaga adat, penanaman nilai-nilai adat budaya kepada generasi muda serta penguatan peranan wanita

7. Penegakan supremasi hukum, politik dan hak asasi manusia serta tata pemerintahan yang baik

Skenario penataan dan pengembangan Kota BauBau mengarah pada dua kebijakan utama yaitu pengembangan tata ruang Kota BauBau dan pengembangan melalui optimalisasi melalui penataan kawasan pusat dan pengembangan melalui pembentukan pusat pertumbuhan baru.

A. Pengembangan Tata Ruang Kota BauBau

Skenario pengembangan kota menurut RTRW Kota BauBau merupakan pemilihan terhadap alternatif alternatif pengembangan kota yang telah dikaji. Menurut RTRWK-BB Tahun 2002, pengembangan tata ruang Kota BauBau ditempuh dengan dua pendekatan yaitu pendekatan melalui pengembangan kegiatan dan pendekatan dengan menciptakan struktur ruang kota yang meluas kearah kawasan-kawasan pinggiran. Gambaran secara lebih jelas diuraikan pada bagian berikutnya :

a. Pengembangan Sistem Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang berkembang di Kota BauBau meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pemukiman, pendidikan, pertanian, dan kegiatan hiburan termasuk didalamnya kegiatan pariwisata dan perhotelan. Kegiatan yang paling besar berpengaruh sebagai motor pertumbuhan kota adalah kegiatan perdagangan dan jasa. Kegiatan-kegiatan lain sifatnya merupakan kegiatan pelengkap sistem perkotaan. Kegiatan perkantoran, utamanya perkantoran swasta dan pemukiman masih terkait erat dengan kegiatan perdagangan dan jasa. Hal ini dicirikan dengan adanya agromerasi lokasi kegiatan-kegiatan tersebut. Bahkan secara umum,

seluruh kegiatan masih berorientasi spasial ke kawasan pusat kegiatan di Kelurahan Wale. Dengan melihat konsep tersebut maka penentuan lokasi pusat pelayanan baru harus disesuaikan dengan kemampuan aksesibilitas yang terjangkau. Hal ini berarti dari segi jarak tidak terlalu jauh, dari segi waktu tidak terlalu lama ditempuh dan CBD. Meskipun demikian kawasan baru harus mampu menjadi *counter magnet* dalam hal skala pelayanan yang telah ditentukan.

b. Pengembangan Struktur dan Morfologi Kota

Pola struktur dan morfologi kota BauBau dapat merupakan pola konsentris setengah lingkaran. Struktur ini timbul akibat pengaruh kegiatan kepelabuhanan. Karena sifat kegiatan kepelabuhanan bersifat berdasar titik nol (node base) maka berpengaruh terhadap morfologi kota berupa zona-zona setengah lingkaran pula. Mengacu pada kenyataan ini maka konsep pengembangan struktur dan morfologi kota BauBau adalah :

1. Pemekaran dilakukan dengan pemekaran fisik kota ke lokasi-lokasi yang sesuai dengan zona komunitas sehingga mudah dilakukan tarikan antar kegiatan
2. Dilakukan dengan mempertimbangkan gaya dorong di kawasan pusat kegiatan dan gaya tarik di pusat kegiatan baru
3. Arah pemekaran disesuaikan dengan kelerengan dan topografi lahan

Dalam Sebuah wawancara pada seorang wartawan surat kabar Kendari Ekspres, Walikota BauBau Drs. MZ. Amirul Tamim, M.Si mengungkapkan bahwa *''melalui penataan ruang yang baik maka sangatlah diharapkan agar seluruh stakeholders mampu memecahkan berbagai persoalan keruangan misalnya, masalah pemukiman kumuh, pertumbuhan wilayah yang tidak terkendali yang semua ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Penanganan yang arif dan bijaksana*

dari semua pihak terhadap isu-isu tersebut akan mengurangi tekanan lingkungan dari kegiatan manusia serta mengurangi terjadinya distorsi ruang yang pada gilirannya akan mendekatkan kita pada satu tujuan yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Hal tersebut sesuai dengan Edwards III yang menitikberatkan pada fungsi sumber daya sebagai salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Selanjutnya Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159) sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementator* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

B. Pengembangan Melalui Optimalisasi Penataan Kawasan Pusat

Kegiatan optimalisasi melalui penataan kawasan pusat kegiatan timbul sebagai akibat dari kejenuhan dan ketidakefektifan di kawasan ini. Indikator-indikator tersebut adalah :

1. Kawasan pusat kota sering terjadi kemacetan lalu lintas khususnya pada jam-jam sibuk akibat bertumpuknya sebagian kegiatan.
2. Harga lahan sangat tinggi dan ketersediaan lahan yang sangat terbatas sehingga sulit melakukan ekspansi atau perluasan usaha
3. Pemisahan ruang yang tidak jelas akibat kurangnya pilihan ruang atau tempat

4. Polusi mulai dari air, udara dan sampah yang mulai mengancam

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka upaya pengembangan kota dapat ditempuh dengan optimalisasi penataan kawasan pusat kegiatan kota. Optimalisasi ini diarahkan untuk membangkitkan kembali (revitalisasi) kawasan pusat kota yang mulai meredup. Revitalisasi ini dapat ditempuh melalui langkah langkah sebagai berikut :

1. Pemisahan blok blok yang jelas dalam kawasan dengan fungsi yang jelas pula.
2. Melengkapi kawasan dengan fasilitas bongkar muat dan parkir sehingga tidak berada di bahu jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas
3. Melakukan perencanaan dan pengelolaan reklamasi pantai untuk mendukung fungsi pelabuhan
4. Melengkapi sarana dan prasarana mulai dari pergerakan, komunikasi, kebersihan, perangkutan, perdagangan, dan lain lain
5. Penataan Kawasan permukiman dibelakangnya yaitu kawasan permukiman sepanjang sungai BauBau

Drs.MZ. Amirul Tamim,M.Si menjelaskan “ *unsur pengendalian penataan ruang Kota BauBau seyogyanya melibatkan seluruh piranti kelembagaan secara penuh baik kelembagaan formal maupun kelembagaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan rencana tindakan sehingga pola dan struktur tata ruang kawasan dapat tertata.* ”

Hal ini sesuai dengan pendapat Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) yang mengungkapkan implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

C. Pengembangan Melalui Pembentukan Pusat Pertumbuhan Baru

Pembentukan pusat pertumbuhan baru dimaksudkan sebagai magnet tandingan bagi kawasan pusat kegiatan yang telah ada. Tanpa adanya pembentukan pusat kegiatan yang telah ada. Tanpa adanya pembentukan pusat pertumbuhan baru, kawasan pusat kegiatan hanya akan menjadi pusat tunggal (single nucleous) sehingga akan menarik seluruh kegiatan yang ada di wilayah hinterland. Konsekuensi ini akan menyebabkan *hinterland* tidak bias tumbuh karena hanya bergantung pada kawasan pusat kegiatan.

Drs.MZ. Amirul Tamim, M.Si menjelaskan bahwa “ *permasalahan penataan ruang perkotaan yang seringkali muncul dan sulit diantisipasi umumnya disebabkan oleh lemahnya fungsi koordinasi. Selain itu, penataan ruang umumnya bersifat makro dan sulit diimplementasikan oleh masyarakat selaku pengguna ruang sehingga seringkali terjadi perbedaan persepsi yang pada akhirnya membuka peluang untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan penataan ruang sebelumnya telah disepakati bersama.*”

Hal ini sesuai dengan Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno,2005:153-154) *Pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena

terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk. *Kedua*, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Lebih lanjut dikatakan, “ *untuk mencegah timbulnya konflik pemanfaatan dalam pelaksanaan rencana tata ruang kota maka pedoman penyerasian rencana tata ruang wilayah Kota BauBau perlu selalu dikaji ulang baik peran maupun fungsinya.*” *Perkembangan yang ada sekarang ini menuntut kita untuk mengubah pola pikir, dan pola tindak kearah yang lebih kreatif dan dinamis sehingga mampu mengantisipasi dan menjawab berbagai konflik kepentingan terhadap tuntutan kebutuhan ruang oleh masyarakat*”.

C. Deskripsi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau

1. Penataan Pedagang Kaki Lima

a. Pengadaan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Kota BauBau telah mengambil langkah langkah untuk membenahi Pedagang Kaki Lima dengan penyiapan lahan perdagangan, serta sosialisasi dan pembinaan dengan membentuk tim operasional lapangan dan pembagian tugas. Koordinasi dengan instansi terkait dan penyiapan produk hukum disiapkan untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima. Tujuan pemerintah adalah penataan dan

pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui penyediaan lokasi baru yang representatif, strategis, dan kapasitas memadai.

Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota BauBau menjelaskan dalam wawancara bahwa :

“Birokrasi sebagai institusi harus mampu menjadi instrumen dalam menangani keperluan keperluan publik dalam hal ini pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima menjadi kebijakan yang sangat penting karena menyangkut visi misi walikota dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang baik dan teratur.” (Wawancara, 15-5-2010).

Hal ini sesuai dengan Teori Edward III dalam Abdullah (1988 : 400) yang mengemukakan Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Lebih lanjut kepala Dinas Tata Kota Dan Bangunan Kota BauBau menjelaskan bahwa :

“Pengadaan Sarana dagang bagi Pedagang Kaki Lima merupakan komitmen Pemerintah Kota BauBau dalam menyediakan keberlanjutan lapangan kerja bagi Pedagang Kaki Lima setelah mereka setuju untuk direlokasi ketempat yang telah disepakati bersama”. (Wawancara, 16-5-2010).

Lokasi Pedagang Kaki Lima yang disediakan oleh Pemerintah Kota BauBau terdiri dari:

- a. Lokasi Binaan Pedagang Kaki Lima Puja Serata di Kompleks Stadion jalan Wa Ode Wau yang terletak pada BWK II

- b. Lokasi Binaan Pedagang Kaki Lima Pasar Buah di Jalan Husni Thamrin yang terletak pada BWK I
- c. Lokasi Binaan Pedagang Kaki Lima Pantai Kamali di Pantai Kamali yang terletak pada BWK I

Sarana dan fasilitas lokasi binaan Pedagang Kaki Lima terdiri dari lahan tempat usaha terbuka, setengah tertutup atau tertutup yang dilengkapi dengan fasilitas sarana MCK, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi yang sepenuhnya milik pemerintah Kota BauBau. Pengadaan, perawatan dan perubahan serta pengelolaan sarana dan fasilitas Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Walikota BauBau melalui Keputusan Walikota.

a. Lokasi Binaan Pedagang Kaki Lima Pujaserata

1. Sarana dan fasilitas usaha lokasi Pedagang Kaki Lima terdiri dari tempat usaha terbuka, setengah terbuka atau tertutup, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi.
2. Penyediaan sarana, pengelolaan fasilitas usaha dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau

b. Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Buah

1. Sarana dan fasilitas lokasi usaha Pedagang Kaki Lima yang terdiri dari pedagang mainan, aksesoris wanita, makanan kecil, yang disediakan berupa tempat usaha terbuka yang terletak di pelataran pantai sementara lapak disediakan oleh pedagang sendiri yang dapat di pasang pada saat mulai menjual dan membongkar

pada selesai berjualan, sementara listrik dan tempat sampah disediakan oleh pemerintah Kota BauBau

2. Penyediaan sarana dan pengelolaan fasilitas usaha dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau.

Lokasi Pedagang Kaki Lima Pantai Kamali

1. Sarana dan fasilitas lokasi Pujaserata terdiri dari tempat usaha setengah terbuka, terbuka dengan fasilitas listrik, air dan penampungan sampah.
2. Penyediaan sarana dan pengelolaan fasilitas usaha dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau.

Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota BauBau mengatakan bahwa pembagian lokasi usaha Pedagang Kaki Lima telah disesuaikan dengan pembagian wilayah berdasarkan BWK. Rencana pembagian BWK, penetapan fungsi, dan pusat pelayanannya di Kota BauBau adalah sebagai berikut :

1. BWK I meliputi seluruh Kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan. Secara administrasi BWK I meliputi Kelurahan Wale, Tomba, Bataraguru, Wangkanapi, dan Bukit Wolio Indah. Fungsi utama yang dikembangkan meliputi perkantoran swasta, pusat perdagangan dan jasa jenis dan perdagangan grosir dengan skala pelayanan regional dan kota. Sebagai pusat pelayanan ditunjuk Kelurahan Wale
2. BWK II dikembangkan dengan fungsi pendukung perdagangan grosir, dan perdagangan eceran. Secara fisik BWK ini dibatasi oleh sungai BauBau di bagian timur dan meliputi Kelurahan Kaobula, Nganganaumala, Lanto, Wajo, Melai,

Lamangga, Tarafu, Wameo, Bone Bone, dan Tanganapada. BWK ini dipusatkan di Kelurahan Wameo

Izin Penggunaan Lokasi Tempat Usaha

1. Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang menggunakan lokasi tempat usaha, terlebih dahulu harus mendapat Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau
2. Untuk memperoleh izin Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Foto Copy KTP dan KK Kota BauBau
 - b. Profil Usaha Mikro atau Pedagang Kaki Lima
 - c. Surat Pernyataan belum pernah mendapat fasilitas lokasi tempat Pedagang Kaki Lima yang dimohon
3. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diberikan Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau
4. Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau

Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) berkewajiban:

- a. Menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan
- b. Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi usaha mikro Pedagang Kaki Lima
- c. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan
- d. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dilarang:

- a. Merubah bentuk dan fungsi tempat usaha
- b. Memperdagangkan barang-barang terlarang
- c. Melakukan perbuatan asusila di tempat usaha
- b. Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Maksud pengaturan tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima untuk mendukung ketertiban Kota BauBau melalui penataan lingkungan dengan penyediaan prasarana dan sarana Usaha Pedagang Kaki Lima pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan dan sifatnya permanen untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokasi dimaksud.

Tujuan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau adalah:

- a. Untuk memberikan kesempatan berusaha pada lokasi yang digunakan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja
 - b. Memberikan daya dukung berusaha melalui pemberian legalitas perizinan pemanfaatan sarana tempat usaha
 - c. Mengendalikan berkembangnya usaha di Kota BauBau pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai peruntukan
- c. Penempatan Pedagang Kaki Lima

Setelah Lokasi disediakan dan kelompok Pedagang Kaki Lima telah terbentuk maka Pedagang Kaki Lima menempati lokasi yang telah di atur menurut nomor urut pemakaian.

Pembinaan Pedagang Kaki Lima di lokasi Pedagang Kaki Lima dilakukan melalui:

- a. Bimbingan teknis peningkatan keterampilan usaha
- b. Penyuluhan teknis peningkatan keterampilan usaha
- c. Mendorong pembentukan dan pembinaan koperasi di lokasi binaan usaha Pedagang Kaki Lima.

Bimbingan teknis tersebut mencakup:

- a. Bimbingan teknis dagang eceran
- b. Bimbingan teknis akses sumber-sumber bahan baku

c. Bimbingan teknis akses sumber-sumber permodalan dan pemanfaatan permodalan

d. Pendampingan pedagang eceran

Penyuluhan teknis mencakup:

a. Penyuluhan teknis dagang aceran

b. Penyuluhan teknis akses sumber-sumber bahan baku

c. Penyuluhan teknis akses dan pemanfaatan permodalan

Mendorong pembentukan kelompok Pedagang Kaki Lima mencakup:

a. Peningkatan manajemen dan organisasi kelompok

b. Peningkatan manajemen pengelolaan lokasi

Mendorong pembentukan dan pembinaan koperasi di lokasi Binaan Usaha

Pedagang Kaki Lima mencakup:

a. Peningkatan manajemen dan organisasi koperasi

b. Peningkatan akses pasar dan pangsa pasar

c. Peningkatan akses permodalan dan sumber-sumber permodalan

d. Peningkatan akses teknologi tepat guna

e. Peningkatan akses kemitraan

Koordinasi pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau. Sedangkan Pembinaan Usaha Pedagang Kaki Lima juga dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau.

Pengawasan dilaksanakan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan seluruh jenis lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang mencakup kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran perilaku usaha yang tertib sesuai ketentuan yang berlaku kepada usaha Pedagang Kaki Lima
- b. Penerapan sanksi setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Mengoordinasikan penertiban lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Koordinasi pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau. Sedangkan pelaksanaan pengawasan juga dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

2. Pendekatan Birokrasi dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau

Fakta pengurusan PKL yang dilakukan pemerintah daerah di beberapa tempat menggunakan preferensi represif. Pendekatan seperti ini kurang memberikan efek yang positif, karena pihak PKL menerima kebijakan dengan secara paksa tanpa bertanya dan menegosiasikan kebijakan yang dianggap benar oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, kata kunci yang harus ada dalam suatu produk kebijakan pembangunan dalam era otonomi daerah, seharusnya merupakan hasil komunikasi dan negosiasi dari seluruh *stakeholders* pembangunan, sebagai wujud partisipasi dan kebebasan. Hal ini didasari pemikiran bahwa kegagalan dari implementasi kebijakan pembangunan selama ini, salah satu sebabnya karena cenderung mengabaikan

stakeholders lain tanpa adanya komunikasi dan negosiasi dalam melaksanakan kebijakan, sehingga akibatnya kebijakan pembangunan banyak mengalami penentangan dan penolakan dari berbagai pihak.

Kekisruhan, dan resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan yang terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia karena adanya perbedaan pemahaman dan kurangnya negosiasi antara pemerintah dengan masyarakat, selain kebanyakan dilakoni oleh pihak Polisi Pamong Praja dengan pendekatan represif. Pendekatan seperti ini kurang tepat untuk digunakan.

Paradigma baru sektor informal melihat bahwa Pedagang Kaki Lima memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian sehingga perlu didukung dan difasilitasi. Namun dukungan dan fasilitas itu tidak akan banyak bermanfaat bagi sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima, bila prosesnya tidak melibatkan para pelaku sektor tersebut. Akibatnya, program berbiaya mahal dapat menjadi sia-sia karena fasilitas tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan Pedagang Kaki Lima. Pelajaran yang perlu diangkat adalah pemerintah hendaknya tidak lagi menganut paham bahwa Pedagang Kaki Lima tidak mau ditata dan diatur. Justru pemerintah mesti mengintensifkan komunikasi dengan Pedagang Kaki Lima melalui paguyuban mereka agar dapat dihasilkan bentuk penataan dan pembinaan yang sejalan dengan kepentingan masing-masing.

Dengan model partisipasi Pedagang Kaki Lima adalah sebuah program yang mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penataan dan penertiban sektor informal dengan tetap men-sinergikan karakteristik dan aspirasi-partisipatif para pelaku ekonomi (Pedagang Kaki Lima) tersebut. Hasil yang diharapkan adalah

pertama, mempromosikan terciptanya hubungan positif antara pemerintah daerah dengan sektor informal. Hal ini didasari pegamatan sektor informal merupakan tempat persemaian pertumbuhan ekonomi yang dinamis yang dapat dimanfaatkan dan dirawat agar menguntungkan kedua belah pihak secara ekonomi. *Kedua*, mengeliminasi efek negatif dari informalisasi. Efek negatif ini dapat dengan mudah ditemukan dalam situasi dan kondisi kerja para pelaku sektor informal seperti upah yang rendah atau tiadanya jaminan kesehatan.

Lewat model partisipasi Pedagang Kaki Lima berupaya ke arah penciptaan forum *stakeholders* pembangunan perkotaan untuk meningkatkan partisipasi dan akses ke proses pengambilan keputusan. Serta memperkuat relasi antara pemerintah daerah, pelaku ekonomi sektor informal, perguruan tinggi, LSM, dan pengusaha maupun perbankan sebagai mitra.

Maka untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah dapat memberdayakan humas secara optimal. Memberdayakan humas dengan jalan memberikan eksistensi yang besar, terutama dalam memfasilitasi semua *stakeholders* atau publik yang terkait untuk menyatakan pandangan ataupun memberikan aspirasinya terhadap suatu kebijakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah di era otonomi adalah memposisikan humas sebagai ujung tombak untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Eksistensi humas dalam relokasi Pedagang Kaki Lima membutuhkan kolaborasi fungsi dan peran dari publik primer, sekunder dan marjinal, karena dari berbagai publik ini dapat memberikan dukungan kesuksesan kerja Humas. Maka untuk

menyelesaikan permasalahan Pedagang Kaki Lima, Humas harus menetapkan publik mana yang merupakan primer, sekunder maupun marjinal.

Selanjutnya Humas dalam rangka mencapai tujuannya beberapa pendekatan yang dapat mewujudkan model partisipasi Pedagang Kaki Lima. Pendekatan yang dilakukan sangat beragam tergantung dari jenis khalayak yang dihadapinya. Pendekatan atau strategi Humas, antara lain:

a. Strategi operasional

Melalui pelaksanaan program Humas yang dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan (sociology approach), melalui mekanisme sosial kultural dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dari opini publik atau kehendak masyarakat yang terekam pada setiap berita atau surat pembaca dan lain sebagainya yang dimuat di berbagai media massa. Artinya Humas mutlak bersikap atau berkemampuan untuk menyimak (listening), dan bukan sekedar mendengar (hear) mengenai aspirasi yang ada di dalam masyarakat, baik mengenai etika, moral maupun nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut

b. Pendekatan persuasif dan edukatif

Fungsi Humas adalah menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan lain sebagainya

c. Pendekatan tanggung jawab sosial

Menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditujukan untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik sasaraannya (masyarakat), namun untuk memperoleh keuntungan bersama

d. Pendekatan kerjasama

Berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan, baik hubungan ke dalam (internal relations) maupun hubungan ke luar (external relations) untuk meningkatkan kerja sama. Humas berkewajiban memasyarakatkan misi instansi yang diwakilinya agar diterima oleh atau mendapat dukungan masyarakat (publik sasaraannya). Hal ini dilakukan dalam rangka menyelenggarakan hubungan baik dengan publiknya (community relations), dan untuk memperoleh opini publik serta perubahan sikap yang positif bagi kedua belah pihak

e. Pendekatan koordinatif dan integratif

Untuk memperluas peranan humas di masyarakat, maka fungsi humas dalam arti sempit hanya mewakili lembaga atau institusinya. Tetapi peranannya yang lebih luas adalah berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional, dan mewujudkan ketahanan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya (Poleksosbud) dan Hankamnas (Ruslan, 2008)

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau mengatakan bahwa :

"Dalam Pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima ini, Pemerintah Kota BauBau menerapkan bentuk komunikasi yang terus menerus dengan memberikan sejumlah pengertian dan bayangan akan keuntungan, kebersihan, kenyamanan saat berjualan bila menempati lokasi yang telah disediakan, komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya saling pengertian antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota". (Wawancara, 17-5-2010).

Tanggapan tersebut sesuai dengan teori Edward III dalam Winarno (2005 :142-143) bahwa adanya kecenderungan kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Perlu disadari oleh para penentu kebijakan pembangunan bahwa kesuksesan dan kegagalan pembangunan di negara-negara dunia ke tiga banyak dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Hal terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih memiliki pendidikan yang rendah, buta huruf, dan kuatnya ikatan tradisi masyarakat, sehingga sangat sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oleh sebab itu ada beberapa tawaran kepada pemerintah daerah Kota BauBau dalam penataan Pedagang Kaki Lima dengan model pendekatan partisipasi yaitu :

- I. Sosialisasi Peraturan Daerah yang berkenaan dengan Pedagang Kaki Lima, retribusi Pedagang Kaki Lima, ketertiban lalu lintas, kebersihan, ketertiban, keindahan lingkungan tempat beraktivitas

2. Fasilitasi pembentukan paguyuban berdasarkan jenis usaha
3. Mediasi informasi dan fasilitasi paguyuban PKL kepada pemerintah daerah, swasta maupun perbankan sebagai mitra
4. Menganalisis mengembangkan penataan kawasan sentra Pedagang Kaki Lima yang bersih, tertata apik, asri, kelancaran lalu lintas, dan wisata
5. Pembinaan dan pendampingan Pedagang Kaki Lima di sektor ekonomi agar lebih maju serta advokasi
6. Monitoring dan evaluasi aktivitas Pedagang Kaki Lima

D. Deskripsi Dampak Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Sisi Penataan kota dan dari Sisi Pedagang Kaki Lima

Relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota BauBau terhadap Pedagang Kaki Lima dilokasi Pantai Kamali, Pusat Jajanan Pujaserata dan pedagang buah Lembah Hijau sedikit banyak dapat merubah kondisi sosial ekonomi pedagang maupun lingkungan sekitarnya. Setidaknya dikalangan Pedagang Kaki Lima sendiri terdapat kesadaran bahwa kebijakan pemerintah Kota BauBau ini akan membawa pada perbaikan usaha mereka. Begitu pula dari segi ketentraman dan ketertiban, relokasi telah membawa pada kondisi yang lebih baik, yakni dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi kekumuhan, serta membuat lingkungan menjadi nyaman dan aman.

Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota BauBau yang mengatakan bahwa :

"Pengaturan Pedagang Kaki Lima telah membawa dampak positif bagi terciptanya sinergi antara kebijakan publik yang tepat sasaran dengan membaiknya ekonomi masyarakat kecil dalam hal ini Pedagang Kaki Lima, mengingat kedua hal ini saling menunjang satu sama lain." (Wawancara, 17-5-2010).

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang Pedagang Kaki

Lima Pujaserata yang mengatakan Bahwa:

“Penyediaan lokasi yang strategis tentu akan membawa keuntungan yang berlipat ganda bagi kami, mengingat lokasi yang dekat dengan pemukiman masyarakat, pemukim kos kosan, dan merupakan jalur transportasi umum, sekolah dan kampus. Beliau melanjutkan Setelah menjual di lokasi ini pemasukan kami bertambah dan jarang membawa sisa jualan dirumah karena habis terjual” (Wawancara, 15-5-2010).

Edward III menjelaskan bahwa interaksi keruangan didasarkan atas tiga faktor

yaitu :

1. Region yang saling melengkapi (region complemtery) yaitu adanya region yang berbeda kemampuan sumber dayanya, satu pihak surplus di lain pihak minus. Kondisi ini memberikan kemungkinan terjadinya pengaliran yang besar dan membangkitkan interaksi keruangan yang tinggi intensitasnya
2. Kesempatan berinfestasi (intervening opportunity) yaitu adanya kemungkinan perantara yang dapat menghambat terjadinya interaksi. Adanya daerah yang dapat berintervensi terhadap dua daerah yang kemungkinan dapat berinteraksi, yang dapat menghambat proses interaksi keruangan kedua daerah yang disebut terakhir. Adanya alternatif sumberdaya yang menghalangi atau menghambat arus komoditi diantara dua daerah yang berinteraksi (perdagangan), kesempatan intervensi ini dapat menghambat interaksi keruangan
3. Kemudahan transfer pemindahan dalam ruang (spatial transfer ability) yaitu kemudahan transfer dalam ruang ini adalah fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu yang nyata, juga termasuk karakteristik yang khusus dari barang yang ditransfer. Komoditi tertentu yang dibutuhkan suatu daerah dari daerah lain yang

tertentu pula memiliki daya transfer yang tinggi. Jarak yang ditempuh, biaya angkut yang memadai, dan transportasi yang lancar, merupakan kemudahan transfer dalam ruang yang menjamin lancarnya interaksi.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab dan pembahasan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Kota BauBau mengenai pengelolaan tata ruang wilayah terpadu mengacu pada RTRW Kota BauBau sebagai kelanjutan RTRW Propinsi dan RTRW Nasional yang tentunya sangat memperhatikan keseimbangan ruang, tata guna lahan, ketertiban dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kota Bau Bau dalam hal ini melaksanakan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengacu pada RTRW Kota BauBau sebagai aktualisasi visi dan misi pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan Pedagang Kaki Lima ini ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan para pedagang dibandingkan dengan mereka sebelum direlokasi. Hal ini terjadi karena lokasi yang mereka tempati terletak pada lokasi strategis yakni pada lokasi Pantai Kamali yang menjual aneka makanan dan berbagai mainan, Lapangan Lembah Hijau yang menjual aneka buah. Kedua lokasi ini terletak pada BWK I yang memiliki fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa. Baik di Pantai Kamali maupun di Lapangan Lembah Hijau merupakan lokasi dan jalur lalu lintas paling ramai baik siang maupun malam hari sehingga mempermudah proses jual beli. Demikian pula Pusat Jajanan Pujaserata Jalan Wa Ode Wau Stadion Betoambari yang terletak pada BWK II juga merupakan pusat perdagangan dan jasa. Pusat jajanan ini sangat ramai pada siang dan malam hari karena terletak pada jalur lalu lintas ramai,

dikelilingi perumahan masyarakat dan mahasiswa, kampus dan sekolah sekolah. Dengan daya beli yang tinggi secara langsung meningkatkan pendapatan Pedagang Kaki Lima yang berimplikasi positif pada kesejahteraan mereka. Dengan kebijakan relokasi ini terjadi hubungan timbal balik antara Pedagang Kaki Lima dengan pemerintah Kota BauBau secara positif dimana pemerintah Kota BauBau dapat mewujudkan visi jangka panjang yakni “Terwujudnya Kota BauBau Sebagai Kota Perdagangan Dan Pelayanan Jasa Yang Nyaman, Sejahtera Dan Berbudaya Pada Tahun 2023” dan Pedagang Kaki Lima mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka.

2. Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau dalam menyediakan lokasi dagang, pengaturan tempat dan penempatan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan pendekatan strategi operasional, pendekatan persuasif dan edukatif, pendekatan tanggungjawab sosial, pendekatan kerjasama, pendekatan koordinatif dan integratif yang mana pendekatan ini menjadi beberapa indikator keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Edward III yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi.

B. SARAN

Relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan pemerintah Kota Bau Bau sejauh ini telah memberikan gambaran yang baik bagi tata pengelolaan kota modern yang mencakup aspek tata guna lahan, ketertiban masyarakat, dan keindahan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan untuk tahun tahun kedepan agar tata kelola kota menjadi efektif dan efisien yakni dengan lebih mengoptimalkan koordinasi antar stakeholder terkait guna mencapai tujuan yang lebih baik. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan Pedagang Kaki Lima juga dapat menjadi sarana yang efektif bagi terjadinya saling pengertian sehingga tujuan bersama dapat terwujud.

Keterbatasan lokasi pemerintah saat ini menjadi aspek utama dalam mengendalikan relokasi Pedagang Kaki Lima, karena Pemerintah Kota BauBau Mengandalkan lokasi milik Pemkot sebagai tempat merelokasi Pedagang Kaki Lima, Sehingga relokasi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemerintah Kota BauBau, olehnya diharapkan Pemerintah Kota BauBau terus mengembangkan lokasi lokasi pertumbuhan ekonomi baru.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh, Syukur. (1988). *Laporan Temukaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen Dalam Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Asia Foundation.
- Anderson, James E. (1997). *Public Policy-Making*. Third Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Breman, Jan. (1988). *Sistem Tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal, disunting oleh Manning dalam Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: PPSK Universitas Gadjah Mada Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Burhan, B. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Caswell dan Kaplan, Abraham. (1990). *Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali
- Com, Citra. (2003). *Laporan Akhir Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota BauBau*. BauBau: Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota BauBau.
- Dunn, N, William. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita.
- Dye, Thomas R. (1981). *Power and Society North Situate*. England: Mass Publishing Co Onic.
- Ermaya, S. (1994). *Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara*. Bandung: Ramadhan.
- Edward III. (1980). *Implementation Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Easton. (1973). *Strategic Process Research*. Washington: Congressional Quartely Inc.
- Heryawan, W. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Hidayat. (1978). *Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Hidayat. (1983). *Pengembangan Sektor Informal Dalam Pembangunan Nasional; Masalah dan Prospek*. Bandung: PPSDM Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.

- ILO. (1985). *Development of the Rural Informal Sector; Policies and Strategies (A Discussion Paper)* makalah dalam *Asian Sub-regional Seminar of Employment Policies for the Rural Informal Sector in East and Southeast Asia, 24-28 May*. Yogyakarta.
- Imawan, Riswandha. (1999). *Kebijakan Publik Program Studi MAP*. Yogyakarta: UGM.
- Keban, T.Y. (2008). *Enam Dimensi Administrasi Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moekijat. (1995). *Analisis kebijakan Publik*. Bandung: Mandan Maju.
- Moleong, Lexy, J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talisidruhu. (1990). *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prewitt, Eulau. (1993). *Management In Public and Non Profit Organization*. New York: New York Publisher.
- Rachbini, Didik, J dan Abdul Hamid. (1994). *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*. Jakarta: LP3ES.
- Ramli, R. (1992). *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Richardson. (2001) *Dasar Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta: FEUI.
- Salusu, (2000). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Non Profit*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Samodra, Wibawa. (2004). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sethuraman, S.V. (1985). *Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang; disunting oleh Manning, dalam Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: PPSK UGM Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Simon. Herbert, A. (1998). *Perilaku Administrasi Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi, Terjemahan Oleh ST. Dianjung*. Jakarta: Bina Aksara.

- Solichin, Wildan. (2005). *Indikator Keadilan dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Limadi Kota Bandung*. Bandung: ITB.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfa Beta.
- Sumadiningrat, Gunawan. (1999). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Reva Pariwara.
- Thoha, Miftah. (1983). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Wahab, Sholichin, Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi dalam Haryono. (1989). *Pengantar Tentang Sistem Sistem Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Karya.
- Winarno, B. (2008). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirasardjono, Soetjipto. (1985). *Masalah Tenaga Kerja di Sektor Informal*. Jakarta: Prisma V-9.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
(Indepth Interview Guide)****Pertanyaan :**

1. Bagaimana komitmen Pemerintah Kota Bau Bau terhadap penataan ruang wilayah
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan peran stakeholders dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah dalam hal ini relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)
3. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap program relokasi pedagang kaki lima
4. Apa tanggapan masyarakat terhadap relokasi pedagang kaki lima
5. Apa saja yang disumbangkan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pelaksanaan program tersebut
6. Apakah program relokasi pedagang kaki lima dapat meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima
7. Apa manfaat yang dirasakan masyarakat melalui program relokasi Pedagang Kaki Lima
8. Menurut anda apakah relokasi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, dibandingkan sebelum anda di relokasi
9. Menurut anda alasan apa yang menyebabkan peningkatan pendapatan anda bertambah
10. Apakah anda setuju dengan program relokasi ini
11. Apakah anda tenang dan nyaman dengan proses relokasi ini

Lampiran

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Nama : La Ode Zam Zam, SE, M.Si
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan
Alamat : Kota Bau Bau
Hari / Tanggal : Kamis / 15 Mei 2010

Komitmen birokrasi terhadap pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima sangat tinggi. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan selaku instansi teknis tingkat Kota merupakan penanggung jawab atas suksesnya pelaksanaan relokasi tersebut, oleh karena itu kami berupaya untuk melaksanakan dan mengawal program ini dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi tujuan dari program ini dapat terwujud.

Beberapa hal yang kami lakukan adalah mengkomunikasikan kepada Pedagang Kaki Lima yaitu dengan memberikan pemahaman tentang visi relokasi serta strategis untuk melaksanakan program tersebut. Selanjutnya adalah membuat petunjuk teknis dan pelaksanaan sebagai pedoman umum dalam melaksanakan program relokasi tersebut.

Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah dengan melibatkan perencana pembangunan kota Bau Bau untuk menata ruang Kota Bau Bau, ini merupakan harapan Bapak Walikota untuk menciptakan ruang terpadu, oleh karena itu program ini sangat mendapat perhatian sehingga semua unsur yang terlibat mendapat catatan tersendiri.

Birokrasi sebagai institusi harus mampu menjadi instrumen dalam menangani keperluan keperluan publik dalam hal ini pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima menjadi kebijakan yang sangat penting karena menyangkut visi misi Walikota dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang baik dan teratur.

Berdasarkan informasi dari Pedagang Kaki Lima, mereka sangat memahami dan mendukung program relokasi ini. Relokasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, karena penempatan lokasi yang sangat strategis yakni berada di tengah keramaian dan merupakan akses transportasi lokal yang padat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Nama : Feto Daud, SE, M.Si
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota BauBau
Alamat : Kota Bau Bau
Hari / Tanggal : Kamis / 17 Mei 2010

Pengaturan Pedagang Kaki Lima telah membawa dampak positif bagi terciptanya sinergi antara kebijakan publik yang tepat sasaran dengan membaiknya ekonomi masyarakat kecil dalam hal ini Pedagang Kaki Lima, mengingat kedua hal ini saling menunjang satu sama lain.

Dalam Pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima ini, Pemerintah Kota BauBau menerapkan bentuk komunikasi yang terus menerus dengan memberikan sejumlah pengertian dan bayangan akan keuntungan, kebersihan, kenyamanan saat berjualan bila menempati lokasi yang telah disediakan, komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya saling pengertian antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota.

Lampiran**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Nama : Rahmasia
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima Pujaserata
Alamat : Kota Bau Bau
Hari / Tanggal : Sabtu / 15-5- 2010

Kami sangat mendukung program relokasi Pedagang Kaki Lima dibandingkan tempat kami sebelumnya. Lokasi ini jauh lebih menguntungkan, setiap harinya kami mampu berjualan hingga jam 12 siang, dimana keuntungan kami berkisar Rp 200 ribu sehari. Karena tempat jualan kami sepenuhnya dibangun oleh pemerintah dan kami hanya diwajibkan membayar uang retribusi yang sangat tidak memberatkan. Kami menganggap perhatian Bapak Walikota cukup besar pada peningkatan kesejahteraan kami.

Lampiran**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Nama : Sahita
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima Pujaserata
Alamat : Kel. Lamangga
Hari / Tanggal : Sabtu / 15-5- 2010

Sebelumnya kami bekerja sebagai penenun sarung Buton, setelah ada program relokasi penjual makanan ke lokasi Pusat Jajanan Pujaserata BauBau, kami tergerak untuk ikut program tersebut. Dengan modal sendiri Tiga Ratus Ribu Rupiah, kami menjual nasi kuning pada pagi hari hingga siang hari, keuntungan yang kami peroleh perharinya Tujuh Puluh Ribu Sehari, tentu ini sangat berguna bagi kami, kehidupan sehari hari telah teratasi dari menjual makanan pagi ini. Kami bersyukur adanya program ini karena pengunjung yang datang ke tempat kami tiap hari makin bertambah.

Penyediaan lokasi yang strategis tentu akan membawa keuntungan yang berlipat ganda bagi kami, mengingat lokasi yang dekat dengan pemukiman masyarakat, pemukim kos kosan, dan merupakan jalur transportasi umum, sekolah dan kampus. Beliau melanjutkan Setelah menjual di lokasi ini pemasukan kami bertambah dan jarang membawa sisa jualan dirumah karena habis terjual

Lampiran**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Nama : Suryani
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima Pujaserata
Alamat : Kota Bau Bau
Hari / Tanggal : Sabtu / 15-5- 2010

Sebelum direlokasi kami berjualan di Jalan PK, tiap malam hari menjual berbagai panganan untuk makan malam, jualan kami terletak bibir jalan, lokasi tersebut sangat padat dan sempit, karena padatnya pembeli seringkali membuat macet, kalau sudah macet, tentu hasil jualan kami berkurang, karena pelanggan enggan berdesak desakan di lokasi tersebut. Setelah direlokasi pada Pusat Jajanan Pujaserata Jalan Wa Ode Wau, dengan lokasi parkir yang luas, strategis, karena berdampingan dengan perumahan masyarakat dan pusat keramaian, pendapatan kami meningkat signifikan. Tentu kami sangat berterima kasih dengan adanya relokasi ini.

Lampiran**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Nama : Inal
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima di Pantai Kamali
Alamat : Kota Bau Bau
Hari / Tanggal : Minggu / 13 Juni 2010

Kami telah menjadi Pedagang Kaki Lima di Pantai Kamali sejak tahun 2000, sebelumnya kami menempati lokasi trotoar di Buton Beach, namun sejak tahun 2005 terjadinya reklamasi Pantai Kamali kami menempati salah satu sudut di lokasi pantai tersebut. Kami membandingkan penghasilan setelah adanya reklamasi pendapatan kami meningkat secara signifikan. Program ini menurut kami telah berhasil meningkatkan kesejahteraan kami.

Lampiran**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Nama : Udin
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima di Pantai Kamali
Alamat : Kota Bau Bau
Hari / Tanggal : Minggu / 13 Juni 2010

Setelah relokasi pedagang mainan di pelataran Pantai Kamali, kami menjual berbagai macam mainan anak anak mulai dari mobil mobilan, balon gas, bola plastik kecil untuk anak anak, boneka, selama berjualan menunjukkan bahwa, sedikit demi sedikit pelanggan kami bertambah seiring dengan makin ramainya pengunjung, sebelum di relokasi kami berjualan pada tempat yang tidak menentu tergantung situasi keramaian, hal ini membuat kami berjualan berpindah pindah. Dari sisi pendapatan, keuntungan kami bertambah karena pelanggan tertuju pada tempat yang sama setiap harinya.

Lampiran**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Nama : Kafaru
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima di Pantai Kamali
Alamat : Kota Bau Bau
Hari / Tanggal : Minggu / 13 Juni 2010

Kami adalah penjual tas tas wanita, pernak pernik aksesoris wanita, aksesoris hp, gelang wanita dan cincin besi putih. Kami memperoleh tempat ini, tentu member kami kesempatan yang baik untuk mengembangkan usaha kami, walau ini usaha kecil kecilan, namun keuntungannya mampu menghidupi kami, itu ditunjukkan dengan lancarnya penjualan dagangan kami. Menurut kami relokasi ini, sangat menguntungkan karena lokasinya strategis, tiap hari pembeli datang tentu ini sangat membantu kami untuk memutar modal usaha kami.

Lampiran**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Nama : Hasima
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Lapangan Lembah Hijau
Alamat : Kota Bau Bau
Hari / Tanggal : Minggu / 13 Juni 2010

Sebelum relokasi kami berjualan di pinggiran jalan yang selalu berpindah-pindah tempat yang disesuaikan dengan tingkat keramaian, namun setelah kami menempati lokasi saat ini kami berjualan lebih tenang dan tertib, sehingga tingkat penjualan buah-buahan kami terus meningkat. Penataan ini sangat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan usaha kami.

Lampiran**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Nama : Riana
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Lapangan Lembah Hijau
Alamat : Kota Bau Bau
Hari / Tanggal : Minggu / 13 Juni 2010

Dengan bantuan lokasi berjualan, dan lapak yang memadai kami meletakkan berbagai macam buah secara teratur, sesuai jenis buah buahan, tentu ini sangat membantu pembeli dalam memilih buah yang mereka inginkan, adanya fasilitas seperti mck dan listrik kami dapat berjualan hingga larut malam, tentu ini memberikan keuntungan yang maksimal untuk kami, kami sangat mendukung relokasi ini, karena tempatnya strategis, merupakan jalur umum dan lahan parkir yang luas.

Lampiran**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Nama : Wa Ida
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Lapangan Lembah Hijau
Alamat : Kota Bau Bau
Hari / Tanggal : Minggu / 13 Juni 2010

Setelah kami berjualan dilokasi ini, sedikit demi sedikit modal kami bertambah karena keuntungan yang memadai, sebelumnya kami berjualan di emperan jalan yang tentu menurut Pemerintah Kota sangat mengganggu ketertiban, hal ini tentu kami selalu di hantui oleh rasa takut akan di razia petugas. Dengan relokasi ini tentu membuat kami tenang dan dapat berjualan dengan tertib. Kami sangat berterima kasih dengan relokasi ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2. Tabel Lampiran 1 : Matriks SWOT Perkembangan Kota BauBau

<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya sistem jaring perdagangan dan industri global 2. Terbukanya sistem kerjasama pendidikan Tinggi 3. Kebijakan Otda 4. Dana dari Pempus, Pemprov dan Dana Investor 	<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dominasi peran perdagangan dan industri wilayah lain ; 2. Membanjirnya arus migrasi yang menambah beban kota ; 3. Musim angin barat yang mengganggu kegiatan pantai ; 4. Proses abrasi pantai akibat gelombang laut. 5. Daerah ranjau laut di antara P. makassar dengan pantai Bau-Bau di BWK V.
<p>Strength</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.13 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota BauBau; 2. Posisi geografis yang strategis; 3. Pelabuhan Murhum dan Bandara Betoambari; 4. Tersedianya dataran perbukitan luas dan kosong; 5. Benteng Kerajaan Buton yang bernilai sejarah. 6. RTRW Kota Bau-Bau 	<p>SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jaring indeg global; 2. Peningkatkan iptek SDM melalui kerjasama Perguruan Tinggi (PT); 3. Pengembangan perguruan tinggi; 4. Optimalisasi pemanfaatan air sungai dengan pembangunan waduk-waduk; 5. Pengembangan kawasan cagar budaya pada Benteng Kerajaan Buton dan beberapa peninggalan sejarah di sekitarnya; 6. Pedoman RTRW Kota Bau-Bau dalam penyusunan RDTRK dan pembangunan. 	<p>ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan konstruksi penahan abrasi sekaligus untuk perluasan dataran pantai dan pemecah gelombang. 2. Peningkatan manajemen kependudukan. 3. Pembersihan ranjau laut agar dapat dimanfaatkan menjadi kawasan wisata dan OR bahari.
<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses kota bawah ke kota atas terhalang oleh lereng lereng curam; 2. Peran serta fungsi bandara dan pelabuhan masih belum optimal; 3. Kondisi jalur jalan tidak mendukung akses ke daerah lain. 	<p>WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah akses dari kota bawah ke kota atas; 2. Mengembangkan peran dan fungsi pelabuhan serta bandara; 3. Pengembangan pola jalur jalan internal dan eksternal. 	<p>WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih menjalin kemitraan dagang dengan daerah lain daripada berkompetisi.

Lampiran 3. Tabel Lampiran 2 : Matriks SWOT RDTR BWK - I Kota BauBau

<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana dari Pempus, Pemprov, swasta dan masy umum; 2. Jaring perdagangan dan transportasi laut nasional dan internasional; 	<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses abrasi pantai akibat gelombang laut; 2. Kegiatan pedagang kaki lima di sekitar pelabuhan yang mengganggu lalu-lintas dan menurunkan citra Kota Bau-Bau.
<p>Strenght</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuh kembangnya aktifitas dan fasilitas perdagangan dan permukiman; 2. Pelabuhan Murhum, pelabuhan Ferry dan pelabuhan Rakyat (Armada Semut); 3. Perairan pantai yang tidak tepat dijadikan budidaya perikanan; 	<p>SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi penataan ruang perairan dengan daratan; 2. Pengemb kawasan terpadu Pelabuhan Murhum, pelabuhan Ferry, pelabuhan Armada Semut dan sekaligus pengembangan pelabuhan peti kemas dan pelabuhan kusus yang terpadu dengan kawasan perdagangan, <i>public space</i> pantai, serta perindustrian dan pergudangan di BWK IV. 	<p>ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemb konstruksi penahan abrasi sekaligus untuk perluasan dataran pantai; 2. Pembangunan tempat usaha PKL di daerah reklamasi yang terpadu dengan <i>public space</i>.
<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas kegiatan perdagangan tidak seimbang dengan ruang dan fasilitas kegiatannya; 2. Pola jalur jalan tidak sistemis dan beberapa terlalu sempit; 3. Sistem drainase kurang bagus pada musim penghujan shg menyebabkan banjir di sekitar S. Bau-Bau. 	<p>WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahkan pembangunan gedung secara bertingkat dan arahan pemb ke kota atas yang kepadatannya rendah; 2. Pemb jalan baru penghub kota bawah dengan kota atas, sekaligus penyempurnaan pola jalan dengan peningkatan kelas beberapa ruas jalan; 3. Peremajaan drainase di daerah rawan banjir. 	<p>WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hindari pemb di daerah rawan abrasi dan rawan Banjir

Lampiran 4. Tabel Lampiran 3: Matriks SWOT RDTR BWK – II Kota BauBau

<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana dari Pempus, Pemprov, swasta dan masy umum; 2. Jaring perdagangan nasional dan internasional. 	<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses abrasi pantai akibat gelombang laut; 2. Bertambahnya para PKL yang berdagang secara tidak teratur di sekitar pasar tradisional mengganggu lalu lintas dan pemandangan.
<p>Strenght</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuh kembangnya aktifitas dan fasilitas perdagangan; 2. Tersedianya laut pantai dangkal di barat muara S. BauBau luas; 3. Dataran perbukitan yang kosong dan tandus dekat bandara; 4. Sebagian S.Bau-Bau masih navigable; 5. Benteng Kraton Kerajaan Buton. 	<p>SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reklamasi laut dangkal di barat muara S.Bau-Bau untuk pengemb ruang perdagangan baru dan <i>public space</i>; 2. Pengemb kawasan perdag baru di dataran perbukitan di tenggara bandara; 3. Pengemb kota tepian sungai. 4. Revitalisasi Kaw bersejarah pusat Kerajaan Buton. 	<p>ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemb konstruksi penahan abrasi sekaligus untuk perluasan dataran pantai dengan fungsi perdagangan dan rekreasi yang sekaligus dapat menampung dan menata para PKL.
<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepadatan bangunan dan penduduk cukup tinggi; 2. Aksesibilitas pantai dengan perbukitan rendah karena terhalang lereng curam; 3. Pola jalur jalan tidak sistemis dan beberapa terlalu sempit. 	<p>WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eliminasi kepadatan gedung dengan pemb secara vertikal yang sesuai peraturan bandara; 2. Pemb jalan baru penghub kota bawah dengan kota atas, sekaligus penyemp pola jalan dengan peningkatan kelas beberapa ruas jalan. 	<p>WT</p> <p>-</p>

Lampiran 5. Tabel Lampiran 4 : Matriks SWOT RDTR BWK-III Kota BauBau

<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana dari Pempus, Pemprov, swasta dan masy umum; 2. Jaring transportasi udara nasional; 3. Jaring pendidikan tinggi; 4. Jaring perhotelan dan pariwisata; 5. Sumber air bersih dari wil lain. 	<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses abrasi pantai akibat gelombang laut;
<p>Strenght</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bandara Betoambari; 2. Tersedianya pantai barat yang panjang dan dan indah serta BUA masih kosong; 3. Dataran perbukitan yang kosong, dan tenang di selatan bandara. 	<p>SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemb pusat kantor pemerintahan eksekutif, legislative dan muspida serta rumah-rumah dinas; 2. Pemb Kaw permukiman baru di sekitar kawasan perkantoran pemerintah; 3. Pengemb Kaw bandara dengan sinkronisasi penataan bangunan dan lingk sekitarnya; 4. Pengemb kaw pendidikan tinggi. 	<p>ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemb konstruksi penahan abrasi sekaligus untuk perluasan dataran pantai;
<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedia sumber daya air yang mencukupi; 2. Aksesibilitas pantai dengan perbukitan rendah karena terhalang lereng curam; 3. Terdapat lereng curam. 	<p>WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sistem jaringan air bersih; 3. Pemb jalan baru penghub kota bawah dengan kotaatas, dan pola jalan di dalam kawasan. 	<p>WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hindari pemb di lereng curam (> 30%); 2. Hindari pemb di daerah rawan abrasi.

Lampiran 6. Tabel Lampiran 5: Matriks SWOT RDTR BWK-IV Kota BauBau

<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana dari Pempus, Pemprov, swasta dan masy umum; 2. Perkemb jaring international industrial sharing Production 	<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses abrasi pantai akibat gelombang laut
<p>Strenght</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dataran perbukitan yang kosong dan luas di dekat pantai Teluk Bau-Bau; 2. Dilewati jalan arteri regional penghubung Kota Bau-Bau dengan ibukota Kab Buton 	<p>SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Kaw industri dan pergudangan di dataran perbukitan Kec Wolio dan Ke Sorawolio; 2. Pemb. Kaw permukiman baru di dataran perbukitan Kec Wolio. 	<p>ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemb konstruksi penahan abrasi sekaligus untuk pelebaran jalan pantai;
<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas pantai dengan perbukitan rendah karena terhalang lereng curam; 2. Kekurangan air baku untuk pengemb industri dan permukiman baru ; 3. Terdapat lereng2 curam. 	<p>WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemb jalan baru penghub kota bawah dengan kota atas, sekaligus peningkatan kondisi jalan arteri regional; 2. Penelitian sumber air baku dan pemb instalasinya. 	<p>WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hindari pemb di lereng curam (> 30%);

Lampiran 7. Tabel Lampiran 6: Matriks SWOT RDTR BWK- V Kota BauBau

<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana dari Pempus, Pemprov, swasta dan masy umum; 2. Kebutuhan pangan masyarakat; 3. Pertandingan olah raga regional dan nasional; 	<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses abrasi pantai akibat gelombang laut; 2. Gagal tanam atau panen akibat kekurangan pasokan air.
<p>Strenght</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dataran perbukitan yang kosong dan luas di dekat pantai Teluk Bau-Bau; 2. Suasana perdesaan yang relatif bebas polusi udara; 3. Perairan pantai yang jernih dan tenang. 	<p>SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengemb Kaw pertanian tanaman pangan dan perikanan laut, khususnya mutiara; 2. Pemb. Kaw gelanggang olah raga, termasuk stadion dan gedung OR dan arena dayung di antara pantai dan P. Makassar; 3. Pertahankan suasana perdesaan yang bebas polusi udara. 	<p>ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemb konstruksi penahan abrasi sekaligus untuk pelebaran jalan pantai; 2. Pemeliharaan dan pengemb sistem irigasi teknis.
<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak ke pusat kota cukup jauh dan aksesibilitas rendah, sehingga daya tarik pengemb BUA kurang; 2. Terdapat perbukitan dengan lereng2 curam di timur. 	<p>WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemb jalan baru penghub ke pusat kota, sekaligus peningkatan kondisi jalannya; 2. Pengembangan hutan di daerah bukit curam. 	<p>WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hindari pemb di daerah rawan abrasi

Lampiran 8. Tabel Lampiran 7: Matriks SWOT RDTR BWK – VI Kota BauBau

<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana dari Pempus, Pemprov, swasta dan masy umum; 2. Kebutuhan hasil perkebunan; 3. Kebutuhan perlindungan lingkungan hidup 	<p>Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perambahan hutan pada daerah hulu.
<p>Strenght</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kawasan hutan di daerah tinggi; 2. Terdapat usaha perkebunan rakyat; 3. Dilewati jalan arteri regional penghub Kota Bauabau dengan ibukota Kab Buton; 4. Suasana perdesaan yang relatif bebas polusi udara. 	<p>SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan dan pengemb Kaw perkebunan bernilai ekonomi tinggi dan kehutanan; 2. Pertahankan suasana perdesaan yang bebas polusi udara. 	<p>ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan kawasan hutan
<p>Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak ke pusat kota cukup jauh dan aksesibilitas rendah, sehingga daya tarik pengemb BUA kurang; 2. Terdapat perbukitan tinggi dengan lereng2 curam di pinggir kota. 	<p>WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kondisi jalan arteri regional; 2. Pemeliharaan Kaw hutan di daerah tinggi 	<p>WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hindari pembangunan yang membahayakan fungsi hutan.

Lampiran 9. Tabel Lampiran 8 : Fungsi Utama dan Fungsi Pendukung BWK Kota BauBau

BWK	Fungsi Utama	Fungsi Pendukung
I	Pelabuhan	Perdagangan Perkantoran Pemerintah dan / swasta Perumahan Cagar Budaya
II	Perdagangan	Perumahan Pelabuhan
III	Perkantoran Pemerintah	Perumahan Perguruan Tinggi Rekreasi dan Resort Bandara Budidaya Rumput Laut
IV	Industri dan Pergudangan	Terminal Bus Wisata dan Olah Raga Bahari Perumahan
V	Pertanian Tanaman Pangan	Pemukiman Olah Raga Budidaya Perikanan Laut
VI	Perkebunan dan Kehutanan	Perumahan

Lampiran 10. Tabel Lampiran 9 : Penggunaan Lahan Kota BauBau Tahun 2003

No	Uraian Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (ha)
1	Perumahan	795,40	2,835
2	Perkantoran	24,45	0,087
3	Fasilitas Sosial		
	a.Pendidikan	34,38	0,123
	b.Kesehatan	1,74	0,006
	c.Peribadatan	4,34	0,015
	d.Gedung Pertemuan dan Panti Asuhan	0,63	0,002
4	Industri dan Pergudangan	3,64	0,013
	Kompleks Militer/Polisi	10,09	0,036
5	Perdagangan	12,86	0,046
7	Transportasi		
	a.Bandara	16,86	0,060
	b.Terminal	3,14	0,011
	c.Pelabuhan dan Pertamina	11,83	0,042
8	Cagar Budaya	15,51	0,055
9	Taman Rekreasi dan Olah Raga	11,76	0,042
10	Jasa-Jasa (hotel,bank,Pom bensin)	2,84	0,010

11	Kebun/Ladang	1.980,41	7,058
12	Sawah	1.010,72	3,602
13	Tambak	23,66	0,084
14	Rawa	33,57	0,120
15	Semak belukar dan lahan tandus	859,21	3,062
16	Hutan	15.322,80	54,607
17	Dan Lain Lain	149,24	0,532
18	Jumlah	28.060,10	72,45

Sumber : Hasil Perhitungan Tim Perencana, 2003

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 10.a. Tabel Lampiran 9a: Jumlah dan Data Penyebaran Fasilitas Perdagangan di Kota BauBau Tahun 2002

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
1	Pasar Umum Modern	4	Di Pusat Kota (Kec. Betoambari dan Kec. Wolio)
2	Pusat Perbelanjaan	4	Di Pusat Kota (Kec. Betoambari dan Kec. Wolio)
3	Pusat Tradisional	7	Kec. Sorawolio dan Kec. Bungi
4	Toko	310	Di Pusat Kota (Kec. Betoambari dan Kec. Wolio)
5	Warung atau Kios	2.159	Menyebar di Tiap Unit Lingkungan
6	Lokasi Relokasi PKL	3	BWK I (Kec. Wolio) dan BWK II (Kec. Betoambari)
7	Rumah Makan	84	Di Pusat Kota (Kec. Betoambari dan Kec. Wolio)

Sumber : Kota BauBau dalam Angka, 2002

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 11. Tabel Lampiran 10: Matriks Program Pembangunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bau-Bau Jangka Menengah 2004-2008 dan Jangka Panjang Sampai 2013

NO	SEKTOR	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	Jangka Menengah (2004-2008)					Jangka Panjang (2009-2013)
						I	II	III	IV	V	
01	Transportasi	a. Transportasi Darat - Peningkatan ukuran dan kualitas jalan yang menghubungkan kota atas dengan kota bawah - Pemb. / peningk. Jalan lokal primer dan lokal sekunder - Pemb. / peningk. terminal kota dan antar kota - Pemb. dan peningk. jalur jalan utama pantai penghubung Pelabuhan Murhum - jalan poros Pasarwajo-Kapontori - Jalur Pedestrian - Halte	Lihat Peta Penc. Jaringan Jalan	APBN/APBD/BLN	Pemkot/Pemprov.	/	x	x	=/	/	xxx==
			Sda	BLN/APBN/APBD	Pemkot.	/	x	x	x	x	//x/x
			Sda	APBN/APBD	Pemkot.	/	x	x	x	x	//xxx
			Sda	BLN/APBN/APBD	Pemkot/Pemprov.	/	/	x	=	x	xx===
			Sda Sda	APBN/APBD APBN/APBD/Swasta	Pemkot. Pemkot/Pemprov./ Swasta	/	x	x	x	x	==xx xxx==
		b. Transportasi Laut - Peningkatan pelayanan pelabuhan - Reklamasi pantai untuk pengembangan Pelabuhan Peini - Reklamasi pantai untuk pengembangan Pelabuhan Perahu Semut - Reklamasi pantai untuk pengembangan Pelabuhan Khusus (pertamina) - Reklamasi pantai untuk pengembangan Pelabuhan Ferry - Reklamasi pantai untuk perencanaan pelabuhan peti kemas (container) yang terpadu dengan kawasan Industri dan perdagangan	Pelabuhan Peini, Ferry dan Perahu Semut.	APBN/APBD	Dept. Perhub./Pemkot	x	x	x	x	x	=====
			Lihat Peta Rencana Guna Lahan Sda	APBN/APBD	Dept. Perhub./Pemkot	/	x	x	x	x	=====
			Sda	APBN/APBD	Pemkot.	/	x	x	x	x	=====
			Sda	APBN/APBD	Pertamina/Pemkot	/	x	x	x	x	=====
			Sda	APBN/APBD	Dept. Perhub./Pemkot	/	x	x	x	x	=====
			Sda	APBN/APBD	Dept. Perhub./Pemkot	/	x	x	x	x	=====
		c. Transportasi Udara - Penataan Kawasan Bandara Sotoambari - Perluasan landasan pacu bandara Sotoambari - Peningkatan pelayanan bandara.	Lihat Peta Rencana KKOP dan KKB Bau-Bau	APBN/APBD	Dept. Perhub./Pemkot.	/	x	x	x	x	xxx==
			Lihat Peta Rencana Tata Guna Lahan Bandara Sotoambari	APBN/APBD/BLN	Dept. Perhubungan	x	x	x	=	=	====x
Bandara Sotoambari	APBN/APBD		Dept. Perhubungan	x	x	x	x	x	=====		
02	Perdagangan	- Peningkatan Fisik Bangunan Pasar dalam Kota - Pembangunan Fasilitas perdagangan pada kawasan pengembangan kota - Penataan PKL - Reklamasi pantai perputukan fasilitas komersil	Lht Peta Renc. TGL	Swasta/Inpres/APBD/APBN	Pemkot/ Swasta	/	/	/	x	x	xxx==
			Sda	Swasta/APBD	Pemkot/ Swasta	/	/	/	=	=	====x
			Kota Bau-Bau	APBD/Swasta	Pemkot.	/	x	x	=	=	====x
			BWK-II	APBD	Pemkot.	/	x	x	x	x	=====

Tabel Lanjutan;

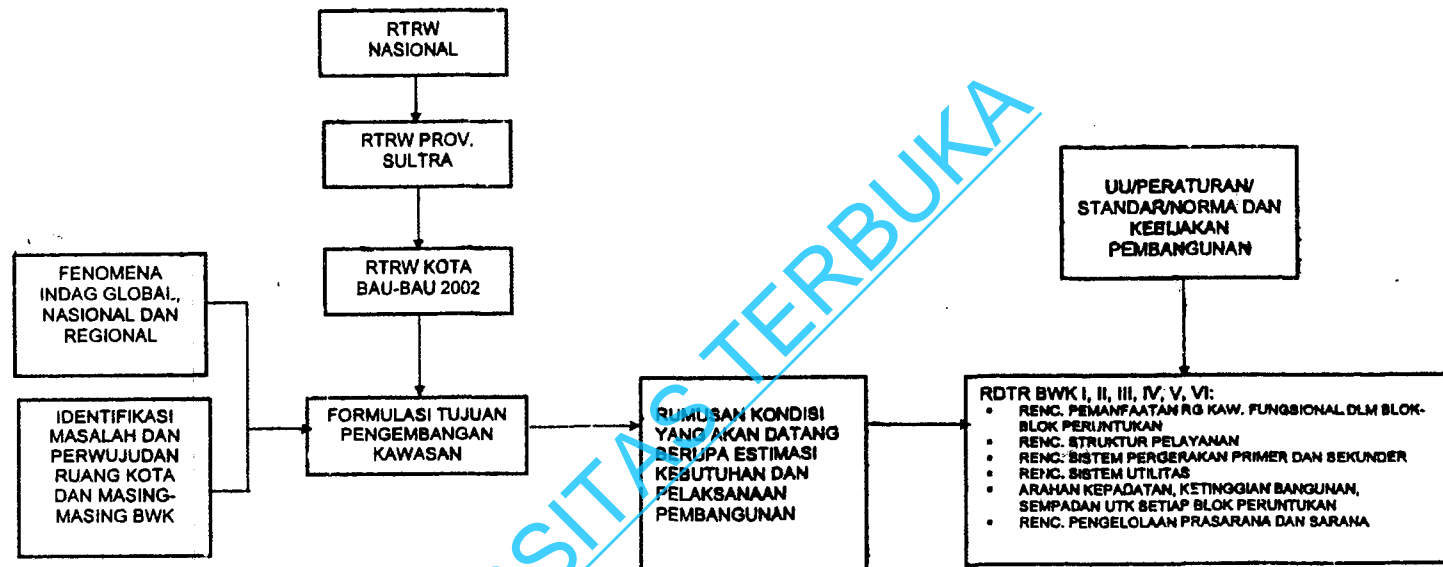
NO	SEKTOR	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKS.	Jangka Menengah (2004-2008)					Jangka Panjang (2009-2013)	
03	Perkantoran	- Pembangunan fasilitas perkantoran pemerintah di Kota atas	BWK-III	APBD/APBN	Pemkot	x	x	x	x	x	=====	
04	Pendidikan	- Pembangunan/ Peningkatan STK	Lht Peta Renc. TGL	Swasta/INPRES/APBD/APBN	Diknas/Swasta	/	/	x	=	=	/xx==	
		- Pembangunan/Peningkatan SD	Sda	Swasta/INPRES/APBD/APBN	Diknas	x	/	/	=	=	//x==	
		- Peningkatan SLTP dan SLTA	Sda	Swasta/INPRES/APBD/APBN	Diknas	x	x	x	=	=	==xxx==	
		- Peningkatan Perguruan Tinggi	Kota Bau-Bau	APBN/APBD/Swasta	Diknas	x	x	x	=	=	=====	
05	Perbadatan	- Peningkatan Fas. Perbadatan	Sda	SWADAYA/APBD/Swasta	Swasta/Pemkot/Masy.	x	x	=	=	=	x // xx	
		- Pembangunan Fas. Perbadatan	sda	SWADAYA/APBD/Swasta	Swasta/Pemkot/Masy.							
06	Industri dan Pergudangan	- Sosialisasi dan pembebasan tanah	BWK IV	APBD/Swasta	Pemkot/Pemprov/ Swasta	/	/	=	=	=	=====	
		- Promosi /penggalangan investor	Regional, Nasional. Internasional BWK IV	APBD/Swasta	Pemkot/ Swasta	/	/	/	=	=	==xxx	
		- Pembangunan Prasarana Pendukung kawasan industri dan pergudangan		APBD	Pemkot	-	x	=	=	=	=====	
07	- Renataan Rumah	- Peningkatan/ Pembangunan	Seluruh BWK	APBD/APBN/SWASTA	PEMDA	x	x	=	x	x	x=====	
08	Kesehatan * BKIA * Rosyandu/Klinik * Puskesmas	- Pembangunan	Lht Peta Renc. TGL	APBD/SWASTA	DEP. KES	/	x	x	=	=	xxx==	
		- Pembangunan/ Peningkatan.	ada	APBD/SWASTA	DEP. KES	/	x	x	=	=	xx==	
		- Peningkatan	ada	APBD/SWASTA	DEP. KES	/	x	=	=	=	x==	
09	Fas. Olah Raga	- Peningkatan/Pembangunan Fasilitas OR dan tempat bermain anak-anak	Sda	APBD/SWASTA	Pemkot	/	=	=	=	x	xx==	
		- Reklamasi peruntukan ruang terbuka umum (Public Space)	BWK-II	APBD	Pemkot	/	x	x	x	=	=	=====
10	Utilitas * Air Bersih	- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Primer dan Sekunder	Lht Peta Jar. Air Bersih	APBD	PDAM/SWASTA	/	x	x	x	x	xxx==	
		- Pengadaan Sumber Air Baku	Sda	APBD/APBN	PEMDA	/	x	x	x	x	==xxx	
	* Drainase	- Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Primer dan Sekunder	Lihat Peta Jar.Drainase	APBD	PEMDA/SWASTA	/	x	x	-	x	xx x--	
		* Listrik	- Penambahan Instalasi	Lihat Peta Jar. Listrik	APBN/SWASTA	PLN/ SWASTA	/	x	x	x	x	xxx==
			- Pengadaan Instalasi	Lihat Peta Jar Telepon	APBN/SWASTA	TELKOM/ SWASTA	/	x	x	=	x	==xx
* Persampahan	- Peningk. & penambahan sarana dan prasarana persampahan	Lihat Gbr Persampahan	APBD	PEMDA	/	x	x	x	=	==xxx		

Tabel lanjutan;

NO	SEKTOR	PROGRAM	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKS.	Jangka Menengah (2004-2008)					Jangka Panjang (2009-2013)
						/	x	x	x	=	-----
11	Kehutanan	- Pengembalian fungsi kaw. Perlindungan pada daerah hulu (daerah tangkapan air).	Lht Peta TGL	APBN/APBD/BLN	PEMDA	/	x	x	x	=	-----
		- Progr. Pendid'kan, bimbingan, dan penyuluhan.	Kota Bau-Bau	APBN/APBD/BLN	PEMDA	/	x	x	x	x	x - - x -
		- Memantapkan peranan sektor kehutanan untuk tetap menjaga kelest. lingk. & kehidupan Masy.	Kota Bau-Bau	APBN/APBD/BLN	PEMDA	/	x	x	=	=	x = x = x
12	Lingkungan	- Konservasi Wilayah Aliran Sungai	Sepanjang WAS	APBN/APBN/BLN	Pemkot	/	x	x	x	=	-----
		- Pembuatan Tanggul pantai dan Muara Sungai yang terpadu dengan kegiatan reklamasi.	Muara sungai Bau-Bau	APBN/APBN	Pemkot	x	x	x	=	=	-----
		- Perlindungan Ekologis Pantai	Kawasan Pesisir Kota Bau-Bau	APBN/APBN/Swasta	Pemkot	x	x	x	=	=	-----

Keterangan : / : Sosialisasi/Usulan Proyek x : Pembangunan/ Peningkatan = : Pemeliharaan - : Tidak ada kegiatan

UNIVERSITAS TERBUKA

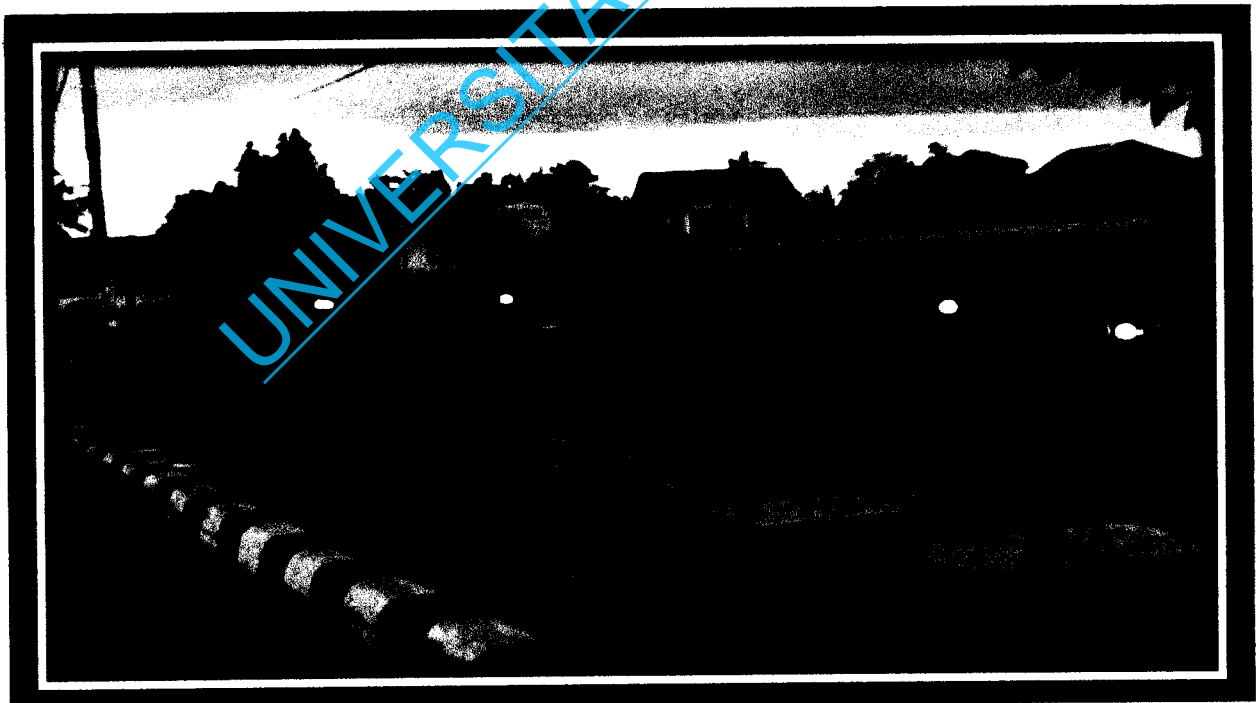


Lampiran 12. Gambar Bagan Alir Penyusunan RDTR Kota Bau-Bau

Lampiran 13. Foto Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota BauBau



Gambar 1 . Pasar Jajanan Semerbak di Jl. Wa Ode Wau yang merupakan Salah satu Model penataan Ruang bagi pedagang Makanan di Kota Bau Bau.Terletak pada BWK II



Gambar 2. Pasar Jajanan Puja Serata Semerbak Bau Bau dikelola atas dasar Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Namun Tetap mengacu pada Penataan Ruang Yang Baik.Terletak pada BWK II



Gambar 3. Salah Seorang Pedagang di Pasar Jajanan Puja Serata Semerbak Bau Bau yang sedang melayani konsumen



Gambar 4. Salah Seorang Pedagang di Pasar Jajanan Puja Serata Semerbak Bau Bau



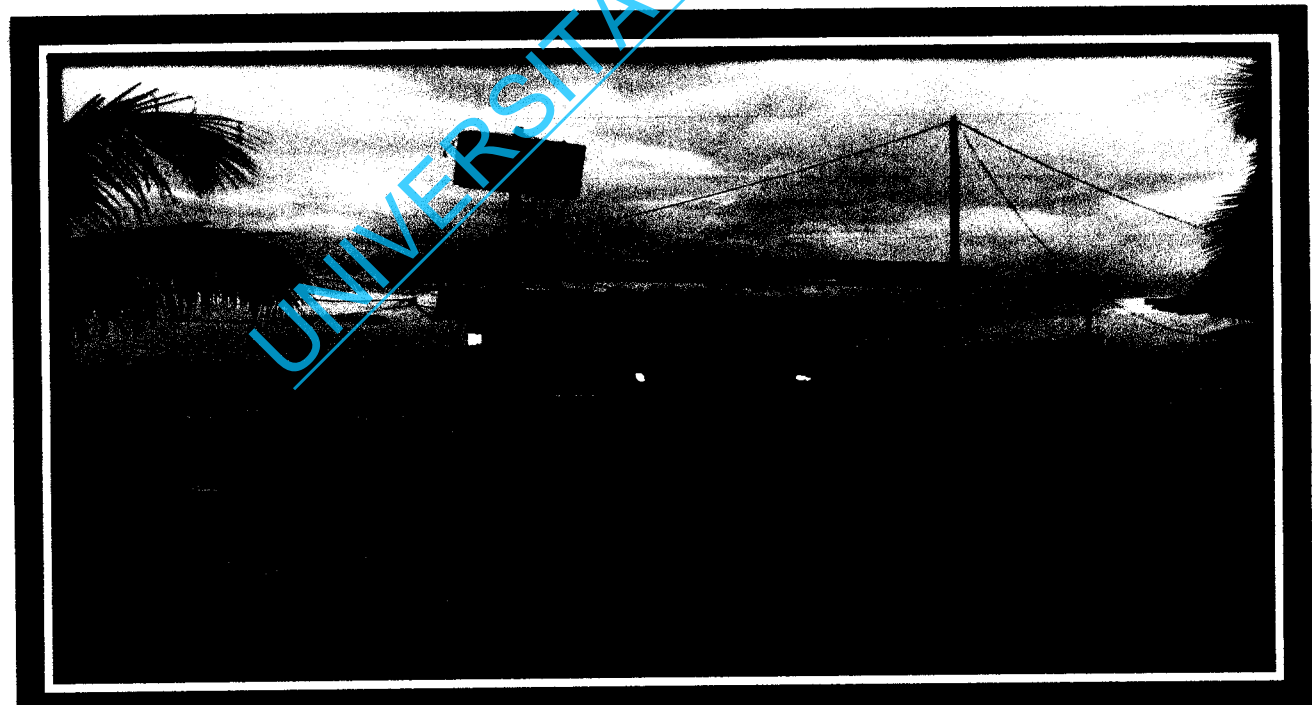
Gambar 5. Pasar Buah Bau Bau di Jl. MH, Thamrin dikelompokkan pada satu lokasi yang sama menjadikan pasar ini terlihat bersih dan tertib. Terletak Pada BWK I



Gambar 6. Barang dagangan terlihat rapi memudahkan pembeli untuk memilih buah yang diinginkan



Gambar 7. Salah Seorang Pedagang yang tengah menunggu pembeli
Gambar 7. Salah Satu Jajakan Buah Yang disiapkan oleh oleh Pemkot, terlihat rapih



Gambar 8. Lokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Kamali pada Kelurahan Wale terletak di BWK I



Gambar 9. Pedagang Jajanan Kamali menjadi pusat kunjungan Masyarakat di Kota Bau Bau, lokasi ini sangat ramai dikunjungi



Gambar 10. Selain Pusat jajanan Pedagang Kaki Lima, Pantai Kamali juga berfungsi sebagai ruang terbuka Bagi masyarakat



Gambar 11. Pusat jajanan Pedagang Kaki Lima, Pantai Kamali Terlihat bersih dan teratur. Terletak Pada BWK I



Gambar 12. Pusat jajanan Pedagang Kaki Lima, Pantai Kamali Terlihat bersih dan teratur



PEMERINTAH KOTA BAU-BAU
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERAS, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan RA. Kartini No. 13 Telp. / Fax (0402) 2825778
B A U - B A U

Bau-Bau, 24 Maret 2010

Nomor : 510 / 90
Lampiran : 1(satu) rangkap
Perihal : Data Pedagang Kaki Lima

Kepada
Yth. **Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri R.I**
Cq. **Direktur Perkotaan**
di-
Jakarta,-

Menindak lanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri R.I Nomor 650/568/VI/Bangda, tanggal 19
Februari 2010 Perihal Pendaftaran PKL di Kawasan Perkotaan, maka bersama
ini terlampir kami sampaikan Data Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk Wilayah
Kota Bau-Bau.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

**Pls. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**



NIP. 19620528 199303 1 004

Tembusan :

1. Walikota Bau-Bau di Bau-Bau (sebagai laporan) ;
2. Arsip.

DATA PEDAGANG KAKI LIMA KOTA BAU-BAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Nama Lokasi		Jumlah PKL	Organisasi Yang Meraungi				Regulasi / Kebijakan Penataan PKL Dimiliki Daerah		Instansi Yang Menangani
			Yang Ditata	Yang Ilegal		Koperasi		Asosiasi		Nomor	Tentang	
						ada	belum	ada	belum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wolio	Wale	PKL Pantai Kamali	-	119		√		√	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
2.	Wolio	Wale	PKL Pasar Laelangi	-	222			√	√	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
3.	Wolio	Bataraguru	-	PKL Pasar Karya Nugraha	70			√	√	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
4.	Wolio	Tombe	PKL Pasar Buah	-	30		√		√	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
5.	Wolio	Bukit Wole Indah	-	PKL Palatiga	9		√		√	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
6.	Wolio	Wale	PKL Pelabuhan	-	30		√		√	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
7.	Murhum	Wameo	PKL Pasar Wameo	-	230		√		√	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Murhum	Lamangga	PKL Pujaserata	-	30		✓		✓	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
Murhum	Bone-Bone	PKL Bone-Bone	-	30		✓		✓	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
Kokalukuna	Kadolomoko	PKL Bukit Kolema	-	10				✓	-	-	Dinas Perindagkop dan UKM
JUMLAH				780							

Bau-Bau, 12 Maret 2010

A.n. Walikota Bau-Bau

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kota Bau-Bau,

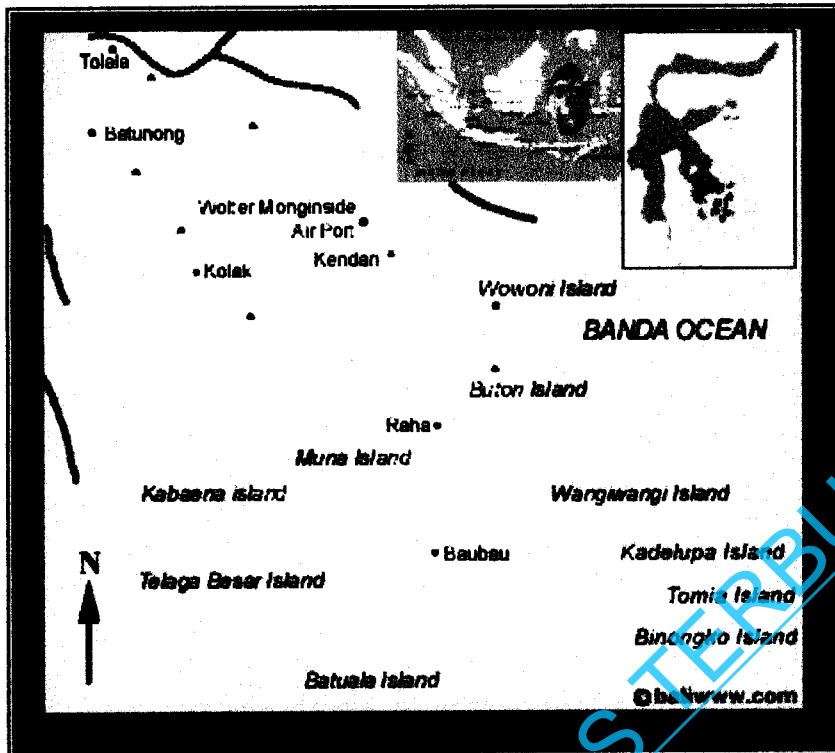


FETU DAUD, SE., M.Si

NIP. 19540317 198001 1 002

LAMPIRAN 15. PETA KOTA BAUBAU

a. Kota BauBau dari Tinjauan Sulawesi Tenggara



b. Kota BauBau dalam Tinjauan Perkecamatan Wilayah

